

**POLA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DESA
TELUK BOGAM MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME)



Oleh

TEDY ARMAN
NIM. 19015078

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020 M / 1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : POLA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
NELAYAN DESA TELUK BOGAM MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ditulis Oleh : TEDY ARMAN

NIM : 19015078

Prodi : MAGISTER EKONOMI SYARIAH (MES)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada program
Studi Magister Ekonomi Syariah (MES)

Palangka Raya, September 2020

Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 196504291991031002

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa
Teluk Bogam Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir Dalam Perspektip Ekonomi Islam.

Nama : Tedy Arman

NIM : 19015078

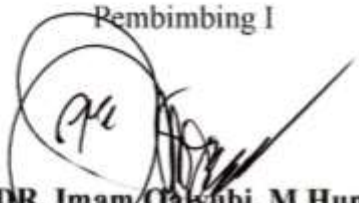
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

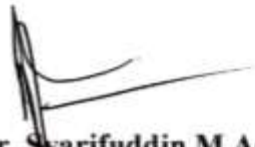
Jenjang : S2

Setelah membaca, mencermati, mengarahkan dan melakukan koreksi terhadap tema dan isi tesis di atas, kami menyatakan setuju untuk menempuh ujian tesis.


Palangka Raya, September 2020

Menyetujui :

Pembimbing I

DR. Imam Cahyubi, M.Hum
NIP. 197204042000031005

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Mengetahui :

Direktur Pascasarjana

Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Ekonomi Islam**”, oleh Muhamad Suham NIM: 18013241 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Shafar 1442 H/ 15 Oktober 2020
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Aula Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Palangka Raya, Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I**
Ketua Sidang

()

2. **Dr. Ibnu Al-Saudi, M.M**
Penguji Utama

()

3. **Dr. Imam Qalyubi, M.Hum.**
Penguji

()

4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Penguji/ Sekretaris

()

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

ABSTRAK

Tedy Arman, NIM: 19015078, Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Pembimbing I Dr. Imam Qalyubi, M.Hum. I dan Pembimbing II Dr. syarifuddin, M. Ag., pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya 2020.

Masyarakat pesisir desa Teluk Bogam seharusnya merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar, tapi pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal. Padahal bantuan dari segi swadaya dan swadana telah di berikan pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pangkalan Bun Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan membentuk kelompok nelayan, tetapi eroninya semua dedikasi yang dikerahkan pemerintah tidak mampu juga dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan desa Teluk Bogam. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam. 2) Faktor apa saja yang melatari kesuksesan dan kegagalan dalam pemberdayaan melalui program (PEMP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis kualitatif deskriptif. Tempat penelitian di Pesisir Pantai Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, subjek pada penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalan Bun untuk sedangkan informen penelitian ini yaitu masyarakat Pesisir desa Teluk Bogam (nelayan KUB). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik pengabsahan data dilakukan dengan tri anggulasi yaitu teknik triangulasi sumber data dan metode, kemudian teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu data *Collection*, reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data.

Temuan penelitan ini adalah: 1) Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) berdasarkan tujuan dan manfaat yang diperoleh bagi penerima program bantuan PEMP sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, akan tetapi pada proses penyaluran bantuannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena banyak sekali mengandung mudharat diantaranya tidak terdapat keadilan dan transparansi antara pihak pemerintah dan masyarakat luas serta dapat mengurangi atau menghilangkan *Maslahah* yang inginn dicapai dari program tersebut. 2) Hal yang melatari kesuksesan atau faktor pendukung adalah kelembagaan yang sudah berbentuk, dan dana sudah disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat juga ikut memonitoring evaluasi dengan adanya pendampingan. Sedangkan factor penghambat jalannya program PEMP adalah, Bantuan tidak merata atau terkesan tebang pilih, Tidak ada upaya yang signifikan dari masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang telah di terima, gaya hidup kelompok masih sangat konsumtif sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural, managemant keuangan masyarakat yang masih buruk serta tidak dilakukan pendampingan dari pemerintah yang harusnya rutin dilakukan sehingga terjadi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat hal ini merupakan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan secara structural.

Kata Kunci: Ekonomi, Masyarakat, Nelayan, Pola, Pemberdayaan

ABSTRACT

Tedy Arman, NIM: 19015078, Patterns of Economic Empowerment of the Fishermen Community in Teluk Bogam Village through the Economic Empowerment Program for Coastal Communities in the Perspective of Islamic Economics, Advisor I Dr. Imam Qalyubi, M.Hum. I and Supervisor II Dr. syarifuddin, M. Ag., at the 2020 IAIN Palangka Raya Postgraduate Program.

The coastal community of Teluk Bogam village should be a prosperous community because of its large natural resource potential, but in fact, until now, most of the coastal communities are still part of the underdeveloped community. Even though assistance in terms of self-help and self-funding has provided the government of the Pangkalan Bun City Fisheries and Marine Service through the Coastal Community Economic Empowerment Program (PEMP) by forming fishermen groups, the erosion of all the dedication mobilized by the government has not been able to improve the standard of life of the fishermen in Teluk Bogam village. . Based on this, this study aims to 1) see the pattern of economic empowerment of the fishing community in Teluk Bogam Village through empowerment programs (PEMP) from an Islamic economic perspective. 2) What factors underlie the success and failure of empowerment through the program (PEMP).

This research uses a qualitative approach, with a descriptive qualitative type. The research site was in the coastal area of Teluk Bogam Village, Kumai District, Kotawaringin Barat Regency, the subject of this study was the Department of Marine Affairs and Fisheries at Pangkalan Bun City, while the informants of this study were the coastal communities of Teluk Bogam Village (KUB fishermen). While the data analysis technique used observation, interview and documentation techniques, the data validation technique was done by triangulation, namely the triangulation technique of data sources and methods, then the data analysis technique was carried out in three stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

The findings of this research are: 1) The pattern of economic empowerment for the fishing community in Teluk Bogam Village through an empowerment program (PEMP) based on the objectives and benefits obtained for recipients of the PEMP assistance program is in accordance with the principles of Islamic economics, but in the process of distributing the assistance it is not in accordance with Islamic economic principles because there are so many disadvantages, including there is no justice and transparency between the government and the wider community and can reduce or eliminate the Maşlahah to be achieved from the program. 2) The underlying factors for success or supporting factors are institutions that are already in shape, and funds have been prepared by the central and local governments, the central government also participates in monitoring evaluation with assistance. While the factors inhibiting the running of the PEMP program are, aid is not evenly distributed or seems selective, there is no significant effort from the community in utilizing the assistance that has been received, the group's lifestyle is still very consumptive, causing cultural poverty, poor community financial management. and there is no assistance from the government which should be done routinely so that there is a gap between the government and the community. This is the root of the problem that causes structural poverty.

Keywords: Economy, Society, Fishermen, Patterns, Empowerment

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Perspektip Ekonomi Islam” adalah benar karya saya sendiri dan bukan penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020
Yang Membuat Pernyataan



Tedy Arman
NIM. 19015078

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.²



¹ QS. Al-Maidah [5]:2

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 902

KATA PENGANTAR



Pertama-tama penulis mengucapkan hamdalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Khairil Anwar M. Ag Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menempuh pendidikan S2 di IAIN Palangka Raya.
2. Dr. H. Normuslim, M. Ag Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Dr. Hj. Muslimah, S. Ag. M.Pd.I., Kaprodi MES IAIN Palangka Raya yang telah memberikan motivasi kepada peneliti di saat menempuh Pendidikan dan penyusunan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Dr. Imam Qalyubi, M. Hum, pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti di saat penyusunan tesis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Syarifuddin, M. Ag, pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti di saat penyusunan tesis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh dosen Pascasarjana, Terkhusus dosen-dosen Magister Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan ilmu yang diberikan mendapatkan manfaat dan berkah di dunia maupun akhirat.
7. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka penyusunan tesis ini.
8. Kepala Desa Teluk Bogam yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka penyusunan tesis ini.
9. Orang tua yang selalu mendo'akan dan memberikan nasehat untuk keberhasilan anak tercinta.
10. Teman-teman sekelas yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menempuh Pendidikan di Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian. Ini tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian bisa diselesaikan.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, Oktober 2020
Penulis,

Tedy Arman
NIM. 19015078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
-----------	---------	-----------------

الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Pemberdayaan	11
2. Tujuan Pemberdayaan	14
3. Pola Pemberdayaan	15
4. Ekonomi Islam.....	16
5. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam	18
6. Pemberdayaan Ekonomi Islam	21
7. Masyarakat Nelayan	23
8. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.....	25
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
B. Prosedur Penelitian	41
C. Data dan Sumber Data	43
1. Data	43
2. Sumber data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Teknik Observasi.....	46
2. Teknik Wawancara	47
3. Teknik Dokumentasi.....	48
E. Analisis Data	49
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	51
G. Kerangka Pikir.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Paparan data Hasil Penelitian	61
1. Pola Program PEMP (Pemberdayaan Ekomomi Masyarakat Pesisir)	61
2. Faktor yang Melatari Kesuksesan dan Kegagalan dalam Pemberdayaan Melalui Program (PEMP).....	75
C. Pembahasan	83
1. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP).....	83
2. Faktor yang Melatari Kesuksesan dan Kegagalan Dalam Pemberdayaan Melalui Program (PEMP).....	100
3. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Program Pemberdayaan (PEMP) dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	108
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Rekomendasi	123
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan. Realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan identik dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.³ Kesulitan melepaskan diri dari belenggu ekonomi karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.⁴

Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kemiskinan tersebut berakar pada tingginya aspek ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut dan keterampilan atau penangkapan nelayan yang masih rendah. Selain itu, kemiskinan nelayan juga disebabkan oleh sebab-sebab yang kompleks.⁵

Ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut dan keterampilan atau penangkapan ini juga terjadi pada masyarakat Desa Teluk

³Syaifuddin Asep, *Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: CV. Sinar Karya, 2003, h. 34.

⁴Kusnadi Edi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKIS, 2004, h. 12.

⁵*Ibid*

Bogam, masyarakat Desa Teluk Bogam dinilai memiliki potensi sumber daya kelautan dapat dijadikan andalan pembangunan daerah. Akan tetapi potensi sumber daya kelautan tersebut masih belum dapat melepaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan agar masyarakat pesisir pantai Teluk Bogam dapat terlepas dari jeratan kemiskinan, kenyataannya belum membawa hasil yang optimal sesuai dengan tujuan utama program pembangunan desa pantai.

Kehidupan nelayan khususnya masyarakat pesisir Pantai Teluk Bogam sangat memprihatinkan, mereka adalah nelayan tradisional yang memakai perahu motor dan alat-alat tangkap sederhana. Nelayan Pesisir Pantai Jakat adalah buruh nelayan dan nelayan tradisional individu maupun kelompok yang tidak memiliki alat produksi yang memadai. Untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran keluarga nelayan baik nelayan tradisional maupun buruh nelayan haruslah diberi kesempatan untuk memiliki sarana dan peralatan penangkapan yang modern dan efektif.

Pada umumnya nelayan desa Teluk Bogam masih mengalami ketergantungan dan keterbatasan terhadap teknologi penangkapan, hal tersebut sangat tinggi. Dengan alat tangkap sederhana, wilayah operasinya menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai. Ketergantungan terhadap musim juga sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama saat musim ombak yang bisa berlangsung sampai lebih dari satu bulan. Akibatnya dengan keterbatasan modal, kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki, pada musim tertentu tidak ada tangkapan yang bisa

diperoleh. Kondisi tersebut merugikan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan perbulan menjadi lebih kecil dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik.

Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat nelayan Teluk Bogam adalah yang terkait dengan produksi merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan selain masalah pemasaran, alat tangkap dan modal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, nelayan berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapnya dan meminjam uang kepada pemilik modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan tetapi, berbagai upaya yang dilakukan oleh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya telah menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan pada posisi lemah. Menurut bapak HN salah satu nelayan pantai Teluk Bogam menyatakan:

rendahnya pendapatan hasil penangkapan ikan yang terkadang sampai tiga hari tidak mendapatkan hasil. Di karenakan musim penceklik dan para nelayan Teluk Bogam yang tidak memiliki alternatif pekerjaan untuk menghadapi apabila musim panceklik hasil laut, sebab keterbatasan kemampuan atau keahlian untuk bekerja selain menjadi nelayan. belum lagi bantuan yang diberikan pemerintah yang cenderung tidak akurat dalam pengelokasian pemberdayaan atau masih adanya unsur nepotisme sehingga menyebabkan para nelayan lebih memilih menjual hasil tangkap kepada pedagang tengkulak.⁶ Seperti halnya fenomena kemiskinan yang terjadi dimasyarakat

nelayan pesisir pantai desa Teluk Bogam faktor utama akar kemiskina tidak sepenuhnya terjadi karena ketidakmampuan menghidupi kebutuhan sehari-hari tetapi masih lemahnya etos kerja nelayan dalam mengembangkan dan

⁶Wawancara dengan HN Sebagai Nelayan pada 06-02-2020.

memanfaatkan swadaya dan swadana yang di fasilitasi serta gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan, yang menyebabkan dari beberapa masyarakat nelayan terindikasi mengalami kemiskinan kultural.⁷ Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang muncul adanya sebagai akibat nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, pemanfaatan waktu yang tidak efektif, cepat puas dengan hasil yang dicapai hari ini, tidak punya tabungan dan masih mempercayai hal yang tabuh dan pantang dalam berproses menjalani usaha.⁸

Masyarakat nelayan desa Teluk Bogam yang kebanyakan terdiri dari nelayan, tradisional, pedagang hasil laut, dan masyarakat lainnya secara umum kehidupan sosial ekonominya sangat tergantung pada sumber daya kelautan. Dilihat dari potensi sumber daya alamnya yang besar, seharusnya masyarakat pesisir desa Teluk Bogam merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Tapi pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal. Padahal dalam data BPS wilayah pesisir desa Teluk Bogam merupakan salah satu desa produktif dalam hasil laut diantara 6 desa pesisir pantai di kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.⁹

⁷Observasi terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan di desa Teluk Bogam pada tanggal 15-Januari 2020.

⁸Koesnadi, *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, 2004, h. 121.

⁹BPS Desa Teluk Bogam h. 5 lihat di <http://kobarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 11-10-2017.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 33.332 jiwa (9.842) kepala keluarga, desa Teluk Bogam merupakan salah satu katagori dari desa miskin tersebut.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf “My” di kantor Desa Teluk Bogam diketahui bahwa jumlah keluarga yang tercatat sebagai keluarga miskin di Teluk Bogam adalah sebanyak 153 kepala keluarga dari 423 kepala keluarga atau sebesar 36.17% dari jumlah penduduk yang ada, keadaan ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yakni keluarga miskin sebanyak 149 kepala keluarga dari 423 kepala keluarga atau 35.22% dari jumlah penduduk yang ada. Keadaan kemiskinan ini dapat dikatakan sangat tinggi mengingat potensi yang ada di Teluk Bogam itu sendiri.¹¹

Kedaan kemiskinan di Desa Teluk Bogam ini menggambarkan bahwa apa yang di lakukan pemerintah masih kurang efektif hal ini disebabkan karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan yang berbentuk fisik seperti bantuan alat tangkap dan tranportasi laut saja yang digalakan.

Seharusnya bantuan dalam hal pembinaan sumber daya manusia inilah yang harus di tekankan karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menggali kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat.

¹⁰BPS Kotawaringin Barat lihat di <http://kobarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 2- 6- 2018.

¹¹ Wawancara dengan bapak “My” pada pukul 20.15 hari Kamis, 16 April 2020

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rad ayat 11 yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat Islam khususnya, sebagaimana dalam firman berikut:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ¹²

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”¹³

Dari ayat di atas ada indikasi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka (kaum) selama mereka (kaum) tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka, maksudnya Allah menyuruh atau mengajak kita agar mau berusaha dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak lengah dan mudah putus asa yang mana pada dasarnya Allah tidak akan memberikan cobaan atau musibah kepada hambanya diluar kemampuan dan Allah tidak merubah nasib hambanya selama hamba tersebut tidak mau berusaha dan bertindak yang lebih baik lagi. Allah juga akan murka dan marah pada hambanya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan hanya pasrah saja dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dengan ini

¹² Q.S Ar-Rad [13]:11

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 1987, h. 251.

diharapkan masyarakat nelayan mampu untuk berusaha hidup agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil sebuah permasalahan yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian dengan judul, Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, agar pembahasan ini lebih terarah, penulis perlu mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Faktor apa saja yang melatari kesuksesan dan kegagalan dalam pemberdayaan melalui program (PEMP)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang melatari kesuksesan dan kegagalan dalam pemberdayaan melalui program (PEMP).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan ekonomi khususnya tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam. Bagi peneliti sebagai pengetahuan tambahan dari teori-teori yang telah didapat selama proses pembelajaran dan menguak fakta-fakta di lapangan dengan realitas teori-teori yang dipelajari.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pemenuhan salah satu tugas akhir bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada prodi magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Bagi lembaga pemerintah, memberikan kontribusi penilaian terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
- c. Bagi nelayan memberikan pengetahuan dan keterampilan masyarakat unruk mensejahterakan ekonomi masyarakat nelayan.

- d. Sebagai literatur sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Landasan penelitian ini, peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik merupakan suatu model penelitian yang berusaha mengungkap realitas perilaku manusia, di mana interaksi simbolik ini memiliki paradigma penelitian tersendiri,¹⁴ sehingga dalam penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di desa Teluk Bogam peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh George Hebert Mead di karenakan peneliti juga sebagai pelaku subjek yang mepotret di setiap fenomena dan menginterpretasikan secara verbal setiap kejadian dan fakta yang didapat.

Interaksi menurut Kamus Komunikasi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat, sedangkan simbolik adalah bersifat melambangkan sesuatu.¹⁵ Ide dasar teori interaksionisme simbolik menyatakan bahwa simbol kebudayaan dipelajari melalui interaksi, orang memberi makna terhadap segala hal yang akan mengontrol sikap tindak mereka. Makna muncul sebagai hasil interaksi di antara manusia, baik secara verbal maupun nonverbal. melalui aksi dan respon yang terjadi, kita memberikan makna ke dalam kata-kata atau tindakan, dan karenanya kita dapat memahami suatu peristiwa dengan cara-cara tertentu. Interaksionisme simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa interaksi sebagai salah satu simbol yang terpenting dan isyarat. Simbol merupakan

¹⁴Andi Kardian Rivai, *Komunikasi Sosial Pembangunan*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016, h, 109.

¹⁵Onong Unchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 352.

suatu proses penyampaian makna. Penyampaian makna dan simbol inilah yang menjadi *subject matter* dalam interaksi simbolik.¹⁶ Mead mengemukakan bahwa ada tiga konsep penting dalam interaksi simbolik, yaitu pikiran (*mind*), diri (*self*) dan masyarakat (*society*).¹⁷

Teori ini memfokuskan perhatiannya pada cara-cara yang digunakan manusia untuk membentuk makna dan struktur masyarakat melalui percakapan,¹⁸ di mana orang mencoba untuk mengontrol pengalaman milik mereka sendiri dan pengalaman orang lain, dan mempelajari bagaimana proses mental menghubungkan informasi sosiokultural dengan pemikiran dan tindakan individu.¹⁹

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²⁰ Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan

¹⁶IB Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 117.

¹⁷Morrisan, Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 44.

¹⁸Morissan, Andy Corry Wardhani, Farid Hamid, *Teori Komunikasi Massa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 126.

¹⁹Andreas Schneider dan David R Heise, “*Simulating Symbolic Interaction*”, *The Journal of Mathematical Sociology*, Vol 20, (Aug 26, 2010): 271, <https://doi.org/10.1080/0022250X.1995.9990165>

²⁰Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Gava Media, 2004, h. 77

kondisi diri sendiri. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empoworment*) berasal kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dalam dua istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.²¹

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan, memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.²²

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain; perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.²³ Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

²¹Nani Machendrawaty, dkk., *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 41-42.

²²Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung : Alfabeta, 2007, h. 1.

²³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005, h. 60.

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena yang demikian itu akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pematapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.
- c. Memberdayakan mengandung arti melindungi perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melindungi artinya mengisolasi dari interaksi, melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah, Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri, dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.²⁴

Berdasarkan paparan sederhana di atas, proses pengembangan atau pemberdayaan merupakan upaya yang dapat membangun sinergi dan memampukan, memandirikan masyarakat dan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

²⁴Doli, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 138.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁵

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan *kognitif*, *konatif*, *psikomotorik* dan *afektif* dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup terciptanya lapangan kerja dan

²⁵Abu Bakar, Jabir al-Jawazir, 'Aisar al- tafsir, Juz II Madinah al munawarah: al maktabah al- ulum wa al-Hikmah, 1994

kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.²⁶

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan. *Human capital teory*, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.²⁷

3. Pola Pemberdayaan

Pola pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan pola mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih

²⁶Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015 ,h. 203.

²⁷Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, , h. 3-4.

memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.²⁸

Tiga parameter indikator keberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah *power with*.
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses.
- c. Tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas.

Secara konseptual tiga parameter ini tersusun secara *gradual* parameter *power with* merupakan parameter paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan parameter lainnya, pola pemberdayaan masyarakat menetapkan kaidah bahwa program memberdayakan masyarakat baru dianggap berhasil ketika program tersebut mampu mewujudkan *power with* pada kelompok sasaran. Indikator *power with* menggambarkan kondisi ketika kelompok sasaran pemberdayaan mampu mengembangkan potensi keberdayaannya sendiri tetapi juga mampu memberdayakan orang atau keluarga lain di komunitasnya.²⁹

4. Ekonomi Islam

Istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*oikos*” dan ”*nomos*”. Artinya “tata kelola rumah tangga”. Tata-kelola itu

²⁸*Ibid.* h. 5

²⁹Suharto,Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 67.

diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah “ekonomi” merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup rumah tangga.³⁰

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mempelajari perilaku manusia yang sesuai dengan tuntutan pada landasan syariah (Al-Qur’an dan Hadist) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falah*). Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian-bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya.³¹

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan sendiri, aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan dengan menghindari diri dari segala yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.³²

³⁰Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 2.

³¹Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 3.

³²Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, ... h. 6.

5. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan yang akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan dua sumber normative dalam agama Islam.³³ Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar sebagai berikut.

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawab di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
- f. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan berusaha cara yang batil, melampaui batas dan sebagainya.³⁴

Ada beberapa nilai yang menjadi sumber dan dasar sistem ekonomi

Islam, diantaranya:

³³Ahmad M Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah dan LPPM, 2005, h. 43-49.

³⁴Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h.2-3.

a. Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam yaitu kepemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup didunia dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam dan pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
35

Aartinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³⁶

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jawazir dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, dan Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.³⁷

b. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti

³⁵Q.S Al-Maidah [5] :120

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 1987, h. 221.

³⁷Abu Bakar, Jabir al – Jawazir, *Aisar al- tafsir, Juz II Madinah al munawarah: al maktabah al- ulum wa al-Hikmah*, 1994, h. 65.

tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Asas keseimbangan dalam ekonomi Islam terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil sebagaimana dalam firman Allah pada surah

Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ³⁸

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”³⁹

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan firman Allah pada surah Al-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا⁴⁰

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

³⁸ Q.S Al-Qashash [28]:77.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita*, Bandung: Wali Oasis Terrace Recident, 2014, h. 183.

⁴⁰ Q.S Al-Nisa [4]: 58

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat).⁴¹

6. Pemberdayaan Ekonomi Islam

Pemberdayaan sosial ekonomi ialah usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Pemberdayaan sosial-ekonomi ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.⁴²

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam. pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan, yaitu

- a. Keadilan sosial,
- b. Kemakmuran merata

⁴¹Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita*, Bandung: Wali Oasis Terrace Resident, 2014, h. 146.

⁴²Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2007, h.75.

- c. perlakuan yang sama di mata hukum
- d. kesejateraan material, mental, dan spritual
- e. kebahagiaan untuk sesama.⁴³

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri.⁴⁴

Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.⁴⁵

Pengembangan Masyarakat Islam, ada tiga kompleks pemberdayaan yaitu: Pertama, pemberdayaan ruhaniah pemberdayaan yang diperlukan karena degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam. Kedua, pemberdayaan intelektual yaitu lebih menekankan pada

⁴³Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992, h. 29.

⁴⁴Nur Mahmudi Isma'il, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul*, Bandung: ISTECS, 2001, h. 28.

⁴⁵Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263-264.

aspek *kognitif* (pengetahuan). Ketiga, pemberdayaan ekonomi mengacu kepada pengembangan sumber daya manusia yang mandiri sehingga pemberdayaan diarahkan kepada kecakapan hidup (*life skill*) dan keterampilan berwirausaha, hal ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan menghindari manusia dari kemiskinan.⁴⁶

7. Masyarakat Nelayan

a. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *Society* berasal dari kata latin, *socius* yang berarti "kawan". Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang artinya ikut serta atau berperanserta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas individu sebagai keluarga, keluarga sebagai tempat prosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil dari proses tersebut.⁴⁷

b. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budi daya, mereka pada

⁴⁶Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat*, ... h.42.

⁴⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 119-120.

umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.⁴⁸ Biasanya masyarakat nelayan dibagi dalam kelompok sesuai dengan posisinya dalam 3 kelompok:

- 1) Nelayan juragan, yaitu nelayan pemilik alat lengkap perahu yang dioperasikan oleh orang lain
- 2) Nelayan buruh, yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- 3) Nelayan perorangan, yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Dari beberapa definisi masyarakat dan definisi nelayan yang telah disebutkan bahwa:

- 1) Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan di laut.
- 2) Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang.⁴⁹

Masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut, Sebagai suatu sistem masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari, faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya.

⁴⁸Mulyadi, *Ekonomi Kelautan...*, h. 7.

⁴⁹ Mulyadi, *Ekonomi Kelautan...*, h. 8.

Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia nelayan sebuah sebutan diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, dengan aktivitas mengeksploitasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentukan oleh musim, rentan terhadap degradasi ekosistem, dan gejolak sosial ekonomi.⁵⁰

8. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap

⁵⁰Surya Irianto, *Nelayan Di Mata Kita Sebuah Perspektif Berpikir Sistem*, (Pekanbaru: CV. Sukabina, 2008), hal. 01

dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir.⁵¹

Tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan secara konstruktif dan bersifat kohesi, beberapa dasar filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.
- b. Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan. Serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan generasi penerus mereka.
- c. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat dikawasan pesisir.
- d. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya

⁵¹Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta : LkiS, 2007), hal. 39.

ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.

- e. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman.

Di samping landasan filosofis di atas, asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Asas kemanusiaan adalah asas ini menempatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia, oleh karena itu, harus dihindari timbulnya percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Asas keadilan sosial asas ini menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat masyarakat di kawasan pesisir.
- c. Asas demokrasi partisipatif asas ini menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Demokratisasi dalam pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan tanggung jawab kolektif dalam mengemban amanat pembangunan. Oleh karena itu, asas

demokrasi partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat.⁵²

Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain, seperti swasta, LSM, atau perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan pesisir. Dalam kerja sama antara pihak ini, yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adalah prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, saling menghormati, serta dapat membawa arus perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya agar skala pencapaian pemberdayaan cukup signifikan maka basis pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan memperkokoh integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Beberapa indikator yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi: individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini:
 - 1) Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat, dan kepercayaan diri menguat.

⁵²Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Pesisir*, Bandung: Humaniora, 2006, h. 35.

- 2) Nilai tabungan dan investasi bertambah.
 - 3) Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan.
 - 4) Kondisi kualitas SDM berkembang baik.
- b. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil.
- 1) Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal.
 - 2) Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 - 3) Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 - 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
 - 5) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.⁵³

⁵³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.58

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan, dapat dilakukan strategi pemberdayaan yang meliputi:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi juga karakteristik masyarakat setempat. Rancangan program pendidikan dan pelatihan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, ini menghindari dari ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat tersebut dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat guna peningkatan kualitas kehidupan mereka. Keahlian dan penguasaan teknologi perikanan bagi generasi muda (terutama anak nelayan dan pembudidaya ikan) merupakan keharusan untuk menjadikan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai pekerjaan utama yang membangakan bagi generasi mendatang.

b. Penyuluhan dan Pendamping

Nelayan dan pembudi daya ikan menentukan sendiri bagaimana memecahkan persoalan dalam komunitas mereka. Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan yang ada dalam lingkungan mereka merupakan fondasi dasar dari pemberdayaan itu sendiri. Keberadaan penyuluh sebagai penumbuh semangat keswadayaan pada individu, kelompok masyarakat sangat dibutuhkan. Memberikan bantuan nelayan dan pembudi daya ikan untuk lebih mengenal dan menggali segala potensi yang ada pada diri mereka dan lingkungan

tempat mereka tinggal. Mendorong individu dan masyarakat untuk mencari kesempatan-kesempatan baru dalam memperbaiki keadaannya.

c. Kemitraan Usaha Perikanan

Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan dan pembudi daya ikan kecil dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil, selanjutnya kerjasama kemitraan dapat dilakukan dengan pemilik lahan bagi pembudi daya ikan kecil.

d. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan

Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil adalah modal yang terbatas menyangkut pemenuhan sarana dan prasarana produksi perikanan. Selain itu persoalan

bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan dan pembudi daya ikan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan dan pembudi daya ikan sebenarnya dapat dilakukan dengan keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan sebagian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tentunya masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan dalam mengelola modal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengelolaan secara kelompok dengan pendampingan dari penyuluh agar dana tersebut dapat digunakan dengan maksimal dan bertanggung jawab.

e. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Informasi

Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan. Nelayan dan pembudi daya ikan harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru menyangkut mata pencahariannya.

f. Kelembagaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan

Kelembagaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan dan pembudi daya ikan, sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati

bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga atau organisasi yang memperlihatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi atau lembaga yang tumbuh dari masyarakat.⁵⁴

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir salah satu program kebijakan pemerintah dalam pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah persoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya, sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan.

Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya, karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir khususnya nelayan dan petani ikan tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu:

⁵⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat* h.58

- 1) Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.
- 2) Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
- 3) Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan didapatkan beberapa judul penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Agus Sjafari dkk, dengan judul *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten: Study Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling.

Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta/ perusahaan.⁵⁵

2. Penelitian yang dilakukan Gede Made dkk, Subagiana, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma*

⁵⁵Agus Sjafari, Dkk, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten: Study Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang*, 2018. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol.2, No.1, Juni 2018, hal. 1

Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif) pada tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu model yang benar-benar berdasarkan kebutuhan dan harapan Masyarakat Pesisir. Model yang benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan dari kelompok yang ada di masyarakat pesisir, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal, terutama orang-orang di tiga desa nelayan: Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana, Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Pengembangan, yaitu: analisis kebutuhan, pengembangan dan pengujian produk serta penerapan produk. Kegiatannya berfokus pada identifikasi dan analisis kebutuhan dengan mengeksplorasi PEMP pernah diterapkan saat ini, mengeksplorasi persepsi dan harapan masyarakat, sebagai dasar untuk pemodelan dan diuji lebih lanjut.

Berdasarkan analisis dan penelitian secara mendalam dengan mengeksplorasi PEMP yang telah berjalan, para peneliti dapat membuat model yang akan lebih cocok dengan PEMP dan lebih dekat dengan keinginan dan harapan masyarakat pesisir. Adapun rancangan/ desain model PEMP baru ini melibatkan 5 (lima) aspek sebagai berikut: Aspek Ekonomi (tentang pekerjaan dan peningkatan pendapatan); Aspek sosial (menyangkut pendidikan).⁵⁶

⁵⁶Gede Made, dkk, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif), 2018. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, vol. 14, no. 2, Juli 2018, hal. 92

3. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidin dkk, Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi serta perkembangan yang terjadi atas pelaksanaan kebijakan pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Sedangkan analisis data menggunakan metode model alir (*flow model*) yang meliputi tahap: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan kebijakan PEMP dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Gerung terdiri dari empat tahap, antara lain yaitu tahap persiapan; tahap pelaksanaan; tahap pengendalian; dan tahap pelestarian. Pemanfaatan dana bantuan telah sesuai dengan tiga komponen kegiatan yang menjadi sasaran tujuan program PEMP, yaitu ekonomi produktif; pelatihan dan pembangunan

sarana dan prasarana dasar lingkungan. Namun masih ada sejumlah anggota KSM yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kegiatan konsumtif. Pembentukan BKM dan KSM dilaksanakan secara demokratis, transparansi, dan jujur, karena kedua lembaga lokal inilah yang berinteraksi dalam pelaksanaan PEMP.⁵⁷

Berdasarkan hasil ketiga penelitian di atas, dalam beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu lebih menekankan terhadap pengaruh kehidupan sosial ekonominya, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan dan pola pemberdayaan terhadap kesejahteraan, masyarakat pesisir pada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Agus Sjafari dkk	Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Provinsi	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi

⁵⁷Penelitian yang dilakukan oleh Junaidin dkk, Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017, h. Journal of Natural Science and Engineering. Vol.1 (1) pp. h. 16

		Banten: Study Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018	Pesisir	Masyarakat Pesisir Di Provinsi Banten
2	Gede Made dkk.	Subagiana, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif) pada tahun 2018.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali
3	Junaidin dkk.	Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Data diolah oleh penulis,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Istilah deskriptif menurut Riduan menyatakan sebagai permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain hanya menggambarkan variabel semata.⁵⁸ Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.⁵⁹ Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Bogam Melalui Program (PEMP) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian yaitu kurang lebih selama dua bulan tertanggal dari oleh Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

⁵⁸Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 8.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi v*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 309.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data dan informasi dari para subjek yang berada di lokasi penelitian, kemudian penulis disajikan kedalam sebuah tesis.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pesisir Pantai Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Lokasi dipilih berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Pesisir Pantai Desa Teluk Bogam yang heterogen mata pencahariannya tetapi mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan banyak melakukan praktek-praktek perekonomian. Pada lokasi juga terdapat pemberdayaan yang diterapkan kepada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dan penelitian ini merupakan tempat yang di mana penulis dapat mengali data secara langsung terjun kelapangan dan memperoleh data yang tepat.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini menyajikan tahapan penelitian sebagai berikut:

Pertama, dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu atau gejala yang hendak dipelajari. Bagian ini juga memuat penegasan bahwa isu tersebut layak diteliti. Dalam hal ini penulis mencari isu-isu atau masalah-masalah yang muncul mengenai pola pemberdayaan ekonomi masyarakat

nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam perspektip Ekonomi Islam.

Kedua, kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu pembahasan atau penelusuran kepustakaan (*literature review*). Pada bagian ini penulis mencari bahan bacaan, jurnal yang memuat bahasan dan teori tentang topik yang akan diteliti. Penulis mencari tau tentang penelitian yang akan dilakukan, apakah sudah terdapat penelitian sebelumnya, apakah ada penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan apakah ada penelitaian yang serupa tapi berbeda focus penelitian dengan penelitan yang akan penulis lakukan. Kemudian menyusun dan merumuskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ada.

Ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi maksud utama dari penelitiannya, hal-hal apa saja yang ingin gali dari penelitian ini dan apa saja yang ingin penulis capai dari hasil penelitian ini .

Keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data rnyangkut pula pemilihan dan penentuan calon partisipan yang potensial. Termasuk dalam bagian ini adalah penentuan jumlah partisipan yang akan terlibat. Hal penting lainnya yaitu mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan para partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis memilah dan menentukan informan mana saja yang berpengaruh terhadap terlaksananya penelitian ini. Informan yang peneliti pilih ini harus sesuai dengan subjek yang ingin penulis teliti.

Kelima, analisis dan penafsiran data. Data yang diperoleh, yang biasanya dalam bentuk teks, dianalisis. Bagian analisis yang dilakukan penulis ini menyangkut klasifikasi dan pengkodean data. Data yang begitu banyak diringkas, diklasifikasi dan dikategorisasikan sesuai keperluan. Ide-ide yang memiliki pengertian yang sama disatukan. Setelah itu dilakukan penafsiran atau diinterpretasi oleh penulis sehingga menghasilkan gagasan guna menjawab permasalahan yang muncul pada tahap satu.

Keenam, tahap terakhir dari tahapan penelitian ini adalah pelaporan. Tahap pelaporan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menuangkan data dan gagasan yang sudah didapat dan dianalisis pada langkah sebelumnya, kedalam bentuk tulisan yang berguna untuk pelaporan hasil penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau angka, atau segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan⁶⁰

Andi Prastowo mengatakan bahwa data dalam penelitian kualitatif merupakan informasi kenyataan yang terjadi di lapangan.⁶¹ Lebih lanjut

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, t.th, h. 114.

⁶¹Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: DIVA Preass, 2010, h. 13

Andi mengatakan data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui *setting* sumber dan dengan berbagai metode.⁶²

Andi Prasrtowo mengelompokkan sumber data peneliian kualitatif ke dalam dua golongan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer sebagai sumber data yang memberikan data kepada pengamatan dan wawancara. Sumber data sekunder sebagai sumber data yang memberikan data kepada pengumpul secara tidak langsung dapat berupa dokumen atau informasi melalui orang lain.⁶³

Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni mengenai pola pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam perspektip Ekonomi Islam.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal, orang, tempat data untuk variable penelitian.⁶⁴ Subjek dalam penelitian ini adalah dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalan Bun dan 5 orang nelayan desa Teluk Bogam untuk dapat memberikan data primer. Informan diambil untuk melengkapi data yang telah diperoleh

⁶² *Ibid.*, h. 19

⁶³ *Ibid.*, h. 20

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h.

dari penulis. Informan tersebut yaitu kepala desa Teluk Bogam. Adapun teknik penentuan subjek yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah cara menentukan subjek penelitian dengan menentukan ciri-ciri atau spesifikasi khusus, adapun ciri-ciri tersebut ialah yaitu:

- a. Lembaga Pelaksana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), dan
- b. Masyarakat Pesisir Desa Teluk Bogam (nelayan KUB) .

Subjek dalam penelitian ini berjumlah delapan orang yang terdiri dari tiga orang dari Dinas kelautan dan Perikanan Kota Pangkalan Bun dan lima orang masyarakat pesisir Teluk Bogam nelayan yang tergabung dalam beberapa kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah serta informan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalan Bun.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen ataupun foto-foto ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian bagi penulis.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari subjek dan informan penelitian serta dokumen-dokumen terkait tentang penelitian, dalam hal ini subjek penelitian adalah tiga orang dari dinas

Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalan Bun dan lima orang nelayan Teluk Bogam dan informan penelitian adalah pegawai dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalan Bun sedangkan dokumen-dokumen adalah dokumen-dokumen terkait pola pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam perspektif Ekonomi Islam, dan foto-foto ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian bagi penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik utama yang digunakan, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan satu teknik penelitian dengan cara mengamati dan melakukan pengamatan, pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁵ Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar.⁶⁶

Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti, atau dengan kata lain observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi penulis untuk mengamati pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Teluk Bogam melalui program

⁶⁵Masri S dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 141.

⁶⁶Suharsimi Arrikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 204.

(PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam.⁶⁷ Data yang ingin diperoleh melalui observasi antara lain, yaitu :

- a. Melihat bagaimana pola pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Program (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Melihat Faktor apa saja yang melatari kesuksesan dan kegagalan dalam pemberdayaan melalui program (PEMP).

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan mendengarkan langsung informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁶⁸ Penggunaan metode ini berdasarkan dua alasan. *Pertama*, dengan wawancara penulis dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh ke dalam dari subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, dan juga masa mendatang.⁶⁹

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada

- a. Informan pihak dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalan Bun selaku perencana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

⁶⁷Masri S dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei...*, h. 141.

⁶⁸Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian...*, h. 70.

⁶⁹M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif Cet. I*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 17.

Pesisir (PEMP) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan desa Teluk Bogam dalam perspektif ekonomi Islam

- b. Informan II Nelayan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat bantuan dari pemerintah.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah meliputi materi (bahan) seperti, fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kakus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara yang mendalam. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan bentuk catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang.⁷⁰

Teknik dokumentasi yang diteliti dalam penelitian, yaitu menggunakan dokumen berbentuk catatan, gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan responden. Tahap dokumentasi diharapkan mampu menunjang aktivitas penulis sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penerapan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam, data yang ingin dikumpulkan dalam dokumentasi penelitian ini meliputi:

⁷⁰*Ibid.*, h. 199.

- a. Tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam,
- b. Buku panduan, surat kabar atau berita-berita yang berkaitan dengan penelitian,
- c. Foto-foto untuk menunjang dokumentasi, dan
- d. Surat Keputusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam

E. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, analisis dan tahap penyajian hasil analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷¹

Sugiyono yang dikutip dari Miles dan Huberman menyatakan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yakni *data collection* *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.⁷²

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 244.

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. VI. h. 218.

1. *Collection* atau pengumpulan data, dalam hal ini penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai pola pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Data Reduction* atau pengurangan data, yaitu semua data yang terkumpul tersebut dipilih antara yang relevan dan tidak relevan. Data yang tidak sesuai ditinggalkan atau dapat tidak dimasukkan sebagai laporan penelitian.
3. *Data Display* atau penyajian data yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan ditentukan dalam bab IV sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian teori yang tersedia. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan *display* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
4. *Conclusions drawing/Verification* atau kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷³

⁷³*Ibid.*,

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh penulis relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini penulis lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga penulis dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁷⁴

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.⁷⁵

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004, h.332.

⁷⁵ *Ibid* Sugiono, *Metode Penelitian*.....h. 274

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, penulis menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, penulis juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.⁷⁶

G. Kerangka Pikir

Judul yang diangkat penulis ialah “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Progra (PEMP) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang

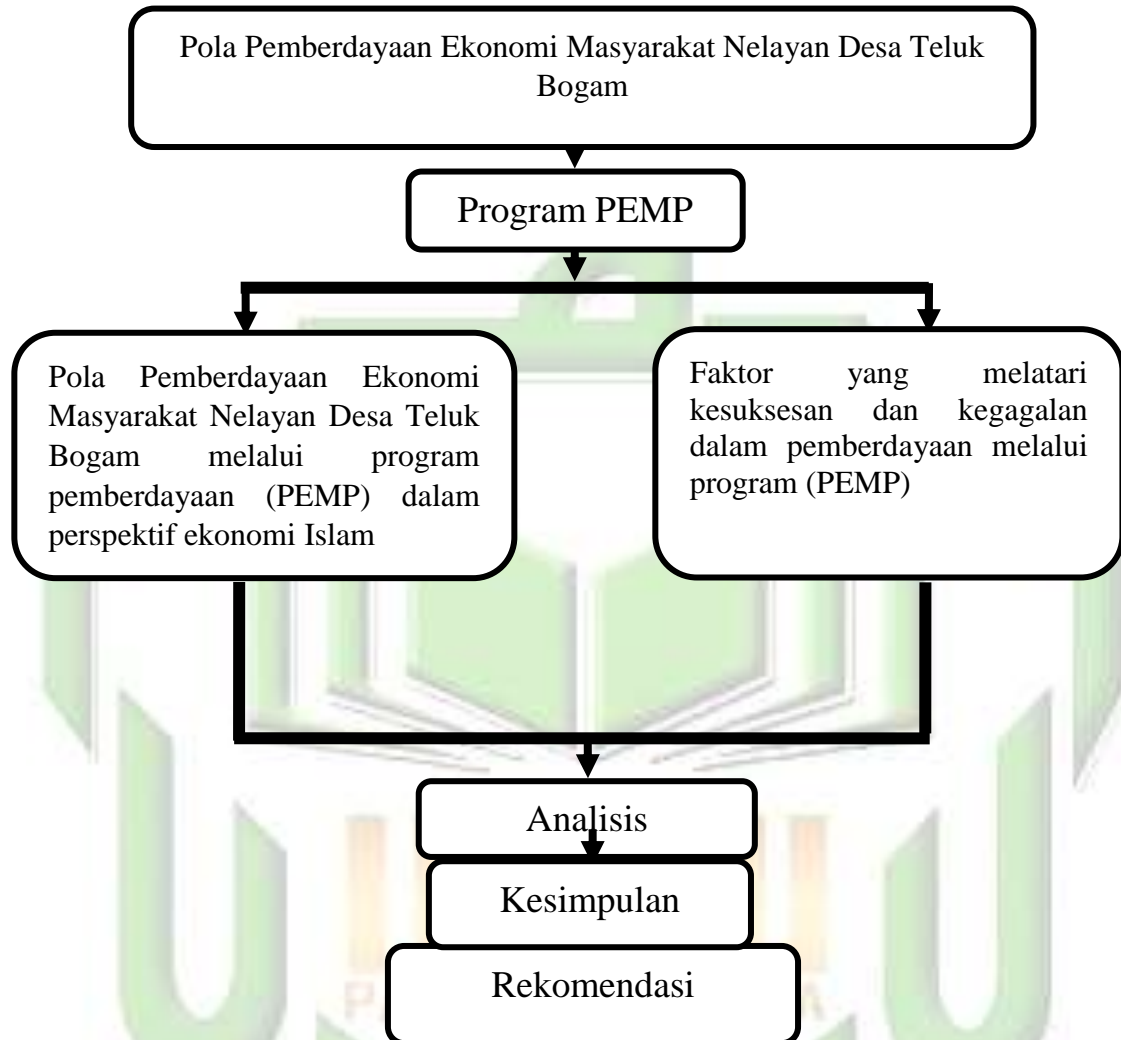
⁷⁶ *Ibid.*

bersangkutan, memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Masyarakat nelayan desa Teluk Bogam yang kebanyakan terdiri dari nelayan, tradisional, pedagang hasil laut, dan masyarakat lainnya secara umum kehidupan sosial ekonominya sangat tergantung pada sumber daya kelautan, dilihat dari potensi sumber daya alamnya yang besar, seharusnya masyarakat pesisir desa Teluk Bogam merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar, tapi pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal. Padahal bantuan dari segi swadaya dan swadana telah di berikan pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pangkalan Bun Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan membentuk kelompok nelayan, tetapi eroninya semua dedikasi yang dikerahkan pemerintah tidak mampu juga dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan desa Teluk Bogam.

Sehingga pemaparan penulis di atas menjadi sebuah judul tesis yaitu pola pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam perspektif

ekonomi Islam. Memperjelas penelitian, maka penulis membuat skematika dalam bentuk kerangka sebagai berikut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Kumai

Kecamatan Kumai merupakan salah satu daerah administratif di Indonesia. dan kata Kumai berasal dari frasa "kembali ke pangkuanku."⁷⁷ Dalam bahasa Bugis berarti "kembali ke pangkuan saya." Sejarah : Kumai pernah menjadi bagian dari Monarki Kotawaringin. Ini pada awalnya dipimpin oleh Pangeran Bendahara, yang kemudian memberikan Kumai kepada Muhammad Cik, Pemimpin Kumai. Cik lalu memberikan posisinya untuk Amsar, yang telah dipilih untuk menjadi Camat Kumai.

Kecamatan Kumai adalah sebuah basis untuk menyerang para pejuang Indonesia Belanda dan Jepang pada tanggal 14 Januari 1946. Banyak tentara tewas di dasar, tapi itu dipertahankan. Untuk memperingati pertempuran, pemerintah membangun sebuah monumen dan Taman Taman dan pada setiap tanggal 14 Januari, orang-orang merayakan di taman untuk mengingat prajurit Kumai.

Kecamatan Kumai mempunyai luas wilayah 2.291 km² dengan jumlah penduduk 48.668 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan

⁷⁷ Data Profil Kecamatan Kumai di <http://kantorkecamatankumai.blogspot.com/> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Kumai rata-rata 16,66 jiwa/km². Batas-batas wilayah Kecamatan Kumai dengan wilayah sekitar:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng.
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan.

Wilayah Kecamatan Kumai terdapat 13 Desa dan 3 Kelurahan, antara lain:

- a. Kelurahan Kumai Hulu
- b. Kelurahan Kumai Hilir
- c. Kelurahan Candi

Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kumai 13 desa yaitu

- 1) Desa Sungai Tendang; 2) Desa Sungai Kapitan, 3) Desa Batu Belaman; 4) Desa Bumi Harjo; 5) Desa Pangkalan Satu; 6) Desa Kubu; 7) Desa Sungai Bakau; 8) Desa Teluk Bogam; 9) Desa Keraya; 10) Desa Teluk Pulai; 11) Desa Sungai Sekonyer; 12) Desa Sungai Cabang, dan 13) Desa Sungai Bedaun.⁷⁸

2. Letak Geografis Desa Teluk Bogam

Desa Teluk Bogam merupakan desa pesisir yang terletak di kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Dengan jarak tempuh 40 km

⁷⁸Data Profil Kecamatan Kumai di <http://kantorkecamatankumai.blogspot.com/> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

dari kecamatan. Batas wilayah desa Teluk Bogam sebelah utara desa Pasir Panjang, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah Timur Sungai Bakau, dan sebelah Barat Desa Keraya.

Luas wilayah desa Teluk Bogam 820 Ha / 8200 km² , luas tersebut luas wilayah tersebut terbagi dari berbagai macam pembagian tanah, yaitu tanah sawah 20 Ha, Hutan Bakau 50 Ha, Pekarangan 23,20 ha, kepadatan penduduk 502 km² dan lainnya 676,5 ha. Desa Teluk Bogam terdiri dari 8 Rukun Tetangga dengan jumlah jiwa sebanyak 1417 jiwa atau 400 kepala keluarga terdiri dari 716 laki-laki dan 701 perempuan.⁷⁹ Berdasarkan data sensus jumlah penduduk menurut pemeluk agama diketahui bahwa masyarakat desa Teluk Bogam 100% memeluk agama Islam.

3. Sejarah Singkat Desa Teluk Bogam

Teluk Bogam diambil dari keadaan dan bentuk wilayah desa yang berada di dalam teluk dengan adanya tanjung yang diberi nama Tanjung Penghujan sedangkan wilayah teluknya banyak ditumbuhi batang Bogam, pohon tersebut hampir sama jenisnya dengan pohon bakau (mangrove) dengan keadaan tersebut maka diambillah nama desa tersebut dengan Nama Teluk Bogam.

Adapun Kepala Desa yang memimpin pertama di desa Teluk Bogam adalah “Pandi” yang dinobatkan sebagai kepala desa pada saat itu dan selanjutnya diteruskan oleh „Ihar” kemudian dilanjutkan lagi

⁷⁹Data Dokumen Profil Desa teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018.

oleh “Asbat” kurang lebih tahun 1975-1981, kemudian dilanjutkan oleh “Sukran” 1981-1988. Setelah itu dilanjutkan oleh “Murah” dari tahun 1988-1995 kemudian dilanjutkan “Ramsan” pada tahun 1995-2002, dilanjutkan oleh “Burhan” dari tahun 2002-2007 kemudian dilanjutkan oleh “M.Yusran” pada periode 2007-2013 dan 2013-sekarang Iyan Dodo dan lanjut pada bapak M. Yusran 2020.⁸⁰

Sejarah singkat yang berdasarkan cerita para tokoh desa Teluk Bogam pada awalnya sebelum menjadi sebuah desa definitive wilayah ini. Penduduk asal wilayah desa ini adalah suku bugis. Pelayaran yang berasal dari Bone ini dibuktikan dengan adanya Makam peninggalan Suku Bugis Alm. Andi Manasa. Sebagai sejarah yang berkembang sampai dengan terbentuknya desa dengan adanya perkawinan dengan beberapa suku asal dan juga warga pendatang yang datang menetap di Desa Teluk Bogam.

4. Keadaan Ekonomi Dasa Teluk Bogam

Keadaan Ekonomi Desa Teluk Bogam berdasarkan data desa yang peneliti kumpulkan bahwa mata pencaharian atau sektor ekonomi di desa Teluk Bogam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Murah selaku salah satu tokoh masyarakat desa dan mantan kades Teluk Bogam pada tanggal 21 Mei 2020.

Data Penduduk Berdasarkan Jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh	42
2	Industri Kecil	24
3	Pegawai/Karyawan Swasta	86
4	Nelayan	377
5	Petani	87
6	PNS	14
7	Polisi / TNI	3
8	Wiraswasta	117
9	Pensiun	17
Jumlah		767

Sumber: Dokumen KAUR Desa Teluk Bogam tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa kondisi ekonomi desa Teluk Bogam bernelayan adalah pekerjaan terbanyak dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai desa Teluk Bogam yaitu sebanyak 377 orang atau sebesar 49,15% dari jumlah penduduk.

5. Potensi Sumber Daya Ikan

Hasil penelitian Direktorat Jendral Perikanan dan Balai Penelitian Perikanan laut 2015, menyatakan bahwa perairan laut Kotatawatingin Barat Kecamatan Kumai untuk kawasan perairan Laut tanjung penghujan yang di tempati dari beberapa desa sekitaran pesisir pantai termasuk Desa Teluk Bogam diperkirakan mempunyai potensi

lestari sumberdaya ikan laut (*Standing Stock*) teritorial sebesar 46.145 ton pertahun dan Potensi Perairan Laut ZEEI sebesar 80.071 ton pertahun dengan jenis ikan pelagis besar dan kecil, demersal dan biota laut lainnya. Jenis ikan untuk Komoditi ekspor adalah tuna, cakalang, bawal, kerapu, kakap, udang putih, udang windu, lobster dan teripang serta jenis ikan untuk komoditi lainnya adalah tongkol, tenggiri, cucut, gurita, udang dogo, layur, cumi-cumi dan lain-lain.⁸¹

6. Unit Penangkapan Ikan

a. Kapal Penangkapan Ikan

Sebagian besar armada penangkapan ikan wilayah perairan pantai desa Teluk Bogam berukuran \pm KM 5-10 GT termasuk armada penangkapan skala kecil dengan demikian, jangkauan penangkapan ikan (*Fishing Ground*) nelayan hanya terkonsentrasi disekitar perairan pantai (\pm 12 Mil laut).

Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan sebagian besar masih menggunakan teknologi yang sederhana, di mana sebagian besar nelayan menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel serta sebagian kecil menggunakan kapal motor.⁸²

b. Alat Tangkap Ikan

Alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan pada umumnya masih tergolong tradisional, hal ini terlihat dari teknologi alat tangkap yang masih sederhana belum

⁸¹Data hasil penelitian Direktorat Jendral Perikanan dan Balai Penelitian Perikanan lautan, 2015.

⁸²Observasi pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 11.30 wib.

menggunakan alat bantu mekanis, berdasarkan jenis alat tangkap yang berkembang diketahui bahwa perkembangan penangkapan ikan masih merupakan usaha penangkapan berskala kecil yang berarti kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan masih terbatas pada perairan pantai. Adapun jenis alat tangkap adalah Trammel Net, Gill Net, Pancing Tetap, Pancing Tonda, Pancing Lainnya, Pukat Tepi, Pukat Dogol, Pukat Payang, Pukat Cincin dan Pukat Lainnya.⁸³

B. Paparan data Hasil Penelitian

1. Pola Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)

a. Sejarah Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di teluk bogam, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan program yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didirikan sejak tahun 2002. Program ini merupakan cikal bakal *holding company* koperasi nelayan yang akan memayungi aktifitas ekonomi masyarakat pesisir.⁸⁴

Hasil temuan penulis tersebut di amini oleh kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan setempat yang menerangkan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tersebut didirikan sejak tahun 2002, sasaran utamanya adalah masyarakat pesisir Teluk Bogam

⁸³Data dinas Kelautan dan Perikanan kota , 2016

⁸⁴ Observasi pada tanggal 1-23 Juli 2020

sendiri yang memiliki skala usaha mikro yang berorientasi pada sektor perikanan dan kelautan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan jasa bahari). Selain itu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir juga memberikan pembelajaran kepada nelayan di wilayah pesisir memperoleh informasi tentang lembaga keuangan untuk memfasilitasi lembaga ekonomi pembangunan pesisir. Beliau juga menjelaskan bahwa berdirinya PEMP adalah bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir Teluk Bogam dan pengembangan usaha masyarakat pesisir berbasis sumberdaya lokal, Program PEMP sendiri dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu periode inisiasi, periode institusionalisasi dan periode deversifikasi. Berikut kutipan wawancara dengan bapak kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan:

“Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini didirikan sejak tahun 2002, sasaran utamanya adalah masyarakat pesisir Teluk Bogam sendiri yang memiliki skala usaha mikro yang berorientasi pada sektor perikanan dan kelautan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan jasa bahari). Selain itu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir juga memberikan pembelajaran kepada nelayan di wilayah pesisir memperoleh informasi tentang lembaga keuangan untuk memfasilitasi lembaga ekonomi pembangunan pesisir. Berdirinya PEMP sendiri bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir Teluk Bogam dan pengembangan usaha masyarakat pesisir berbasis sumberdaya lokal, Program PEMP sendiri dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu periode inisiasi, periode institusionalisasi dan periode deversifikasi”⁸⁵

Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa:

⁸⁵ Wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, 2 Juli 2020 Pukul 09.00

“PEMP merupakan cikal bakal koperasi nelayan di Teluk Bogam dan merupakan salah satu jenis bantuan tidak langsung dari pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi masalah permodalan dan sosial kepada masyarakat pesisir.⁸⁶

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Dalam jangka panjang program PEMP diarahkan kepada: 1) Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir; 2) Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan; 3) pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah”.⁸⁷

Dari hasil pemaparan beliau penulis melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen terkait apa yang disampaikan bapak kepala tersebut dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan dokumen mengenai PEMP yang dimiliki oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yang di dalamnya memuat tujuan didirikannya PEMP, kapan didirikannya dan sasaran didirikannya PEMP tersebut. Dalam dokumen tersebut memang benar bahwa PEMP didirikan sejak tahun 2020 dan tujuan didirikannya PEMP sendiri adalah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir Teluk Bogam dan pengembangan usaha masyarakat pesisir berbasis sumberdaya lokal, sedangkan sasarannya adalah 1) Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

ekonomi masyarakat pesisir; 2) Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan; 3) pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.⁸⁸

b. Pola Program Pemberdayaan Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai

Mengenai pola Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir desa Teluk Bogam kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa pola Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diawali dari perencanaan kegiatan yang dibuat, direncanakan, dilakukan, dan didapat dari masyarakat, dinas hanya memberi fasilitas), partisipatif dan transparan, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan akan menunjuk konsultan manajemen (perguruan tinggi, konsultan profesional atau LSM) berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikut kutipan wawancara dengan kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut:

“Bahwa pola Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diawali dari perencanaan kegiatan yang dibuat, direncanakan, dilakukan, dan didapat dari masyarakat, dinas hanya memberi fasilitas), partisipatif dan transparan, kemudian kami akan menunjuk konsultan manajemen (perguruan tinggi, konsultan profesional atau LSM) berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan tersebut”⁸⁹

⁸⁸ Dokumen PEMP Departemen Kelautan dan Perikanan

⁸⁹ Wawancara dengan kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 Juli 2020 Pukul

Kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sendiri sebenarnya mengacu pada potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat, sedangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup masyarakat nelayan menekankan pada pentingnya masyarakat lokal, yang mandiri, sebagai sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka.⁹⁰

Beliau juga menambahkan bahwa program PEMP ini mendorong masyarakat pesisir berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan melalui penguatan kelembagan masyarakat pesisir diperkenalkan untuk berorganisasi mulai dari sistem manajemen pengembangan usaha produktif (Kelompok Usaha Bersama /KUB) dan sumberdaya pesisir mulai dari perencanaan rencana aksi kegiatan, implementasi kegiatan, serta menumbuh kembangkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.⁹¹

Pemaparan kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas dikuatkan oleh staff badan penyuluhan DKP kota, sebagai berikut:

“Program Pemberdayaan yang dirancang oleh pemerintah untuk masyarakat pesisir khususnya Pantai Jakat adalah program PEMP yang diberikan kepada nelayan Kelompok

⁹⁰ Wawancara dengan kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 Juli 2020 Pukul 09.00

⁹¹ *Ibid*

Usaha Bersama (KUB). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah dilaksanakan sejak tahun 2002. PEMP merupakan salah satu program unggulan dari departemen perikanan dan kelautan dalam rangka mengembangkan masyarakat pesisir yang mata pencarian bersumber dari ekplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan.”⁹²

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa program yang dirancang oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Pantai Teluk Bogam adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang menjadi wadah para KUB dalam mendapatkan bantuan penambahan modal, pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan, meningkatkan harkat dan martabat kelompok.

Bapak JE juga menjelaskan mengenai bagaimana program ini dapat memberdayakan dan apakah program ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir, bahwa mekanisme Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yaitu Perencanaan kegiatannya dibuat, dirancang, dilakukan dan didapat langsung dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sebagai fasilitator (pemberi fasilitas). Jadi jelas bahwasannya PEMP telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.”⁹³

⁹² Wawancara Jurham efendy, staff badan penyuluhan DKP kota, 26 Juli 2020 pukul 09.45 wib

⁹³ Wawancara bapak JE, pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 09.45 wib

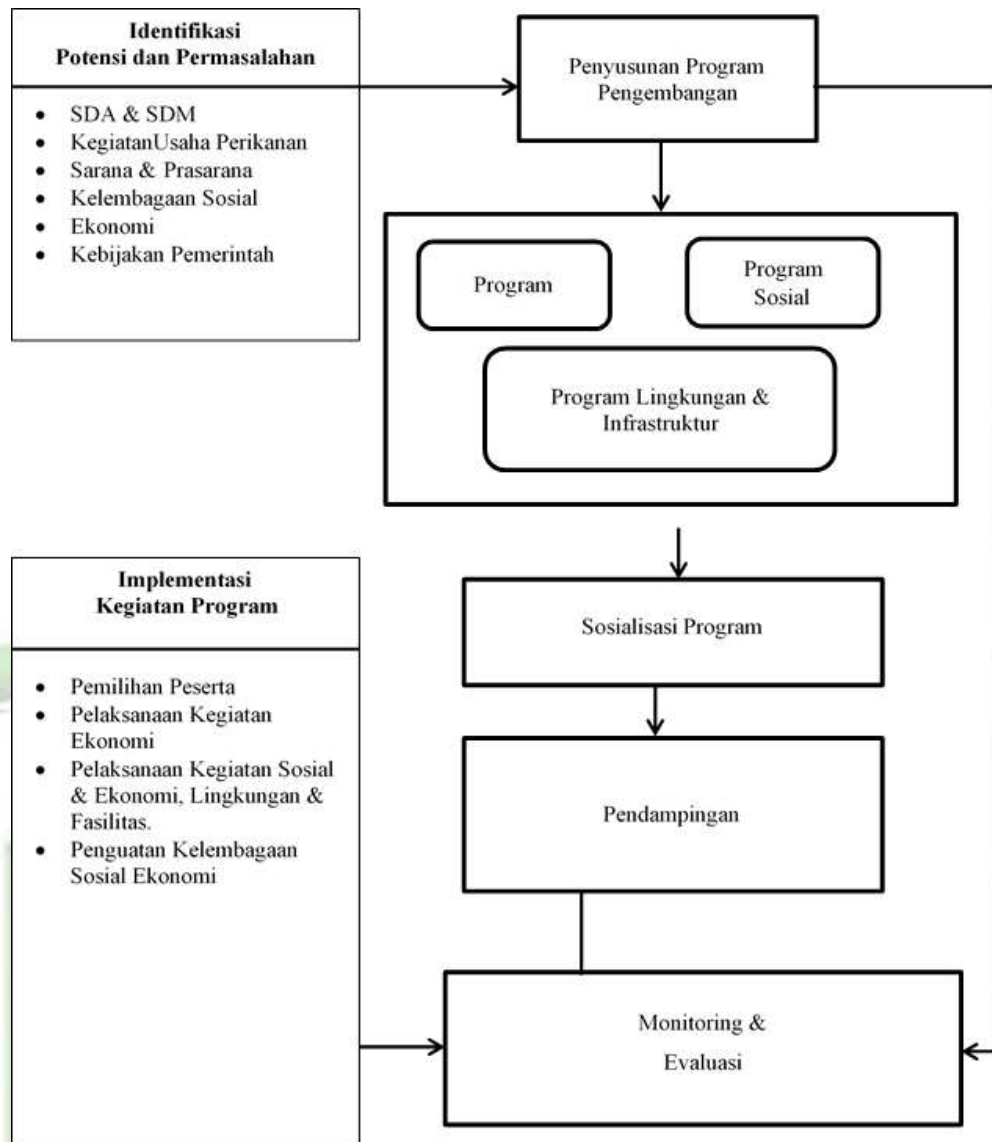
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Syahlani ketua nelayan KUB Bogam Raya yang menyatakan bahwasannya program PEMP disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat telah sesuai dan tepat sasaran.

“program PEMP disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sini dengan mekanisme kami menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan dan menikmati hasilnya untuk kami sendiri sehingga program ini kami rasa telah sesuai dan tepat sasaran.”⁹⁴

Berdasarkan hasil keterangan tersebut, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) menggunakan pola perencanaan kegiatannya dibuat, dirancang, dilakukan dan didapat langsung dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dirasakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir Teluk Bogam.

Dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan penulis melakukan penelusuran terkait dokumen yang menguatkan pemaparan bapak kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan skema pola pengembangan PEMP yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Berikut model pengembangan PEMP, sebagai berikut:

⁹⁴Wawancara bapak SY, pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11.30 wib



Sumber: Pedoman Umum PEMP 2003, Direktorat PMP DKP Desa Teluk Bogam

Selain pemaparan di atas kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjelaskan bahwa:

“Kelompok usaha bersama (KUB) perikanan adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berdasarkan hasil kesepakatan (musyawarah) seluruh anggota yang dilandasi oleh kepentingan, kebutuhan dan keinginan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan bersama. Tujuan dari KUB perikanan sendiri adalah

peningkatan kemampuan usaha secara bersama dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota”.⁹⁵

Mengenai prosedur bentuk bantuan dan klarifikasi Ibu V Staff Adminitrasi Bidang Hasil Tangkap, menjelaskan bahwa prosedur dalam pengajuan bantuan adalah:

- 1) Harus berprofesi Nelayan dan memiliki kartu Nelayan.
- 2) Memiliki kelompok atau kelembagaan yang terdiri dari minimal 10 orang dan maksimal tidak terbatas.
- 3) Berdomisilir di Kotawaringin Barat
- 4) Mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok.
- 5) Permohonan di verifikasi setelah itu di seleksi kelompok yang lulus seleksi di ajukan sebagai calon, maka setelah mendapatkan persetujuan, kelompok tersebut berhak mendapatkan bantuan.⁹⁶

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak SY, selaku salah satu nelayan di Desa Teluk bogam, yaitu:

- 1) Kelompok sudah terbentuk minimal 10 orang, berprofesi sebagai nelayan dan berdomisilir di Kotawaringin Barat.
- 2) Membuat proposal sesuai kebutuhan KUB, setelah itu mengajukannya kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kotawaringin Barat
- 3) Setelah itu berkas diverifikasi dan diseleksi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kotawaringin Barat.
- 4) Pihak KUB tinggal menunggu antrian persetujuan.⁹⁷

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang disampaikan oleh seluruh informan nelayan KUB, Dari hasil penelitian, 20 informan nelayan menyatakan hal yang tidak jauh berbeda tentang prosedur dalam mendapatkan bantuan.

⁹⁵ Wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, 2 Juli 2020 Pukul 09.00 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan bapak SY, 10 Juli 2020 Pukul 14.30 WIB

⁹⁷ Wawancara bapak SY nelayan di Desa Teluk bogam 07 Juli 2020 pukul 13.00 wib

Berdasarkan observasi penulis diketahui ada beberapa KUB yang ada di Desa Teluk Bogam, diantaranya, yaitu:

1) KUB Bogam Hijau

KUB Bogam Baru beralamat di jalan Said Husin Hamzah RT. 02 Desa Teluk Bogam Bapak Syahlani (48tahun) adalah ketua KUB Bogam Baru. Menurut bapak Sukirman, KUB Bogam Baru didirikan pada tanggal 11 September.⁹⁸

Adapun tujuan di dari bentuknya KUB Bogam Raya adalah untuk menumbuh kembangkan suplai ikan-ikan para nelayan yang lancar, mempercepat kegiatan nelayan dalam beraktifitas dalam meningkatkan partisipasi warga nelayan Teluk Bogam agar dapat menambah produktif daya tangkap serta membenahi sekaligus mengembangkan standar minimal bagi layanan warga nelayan Teluk Bogam sebagai realisasi dalam pengembangan usaha-usahanya.⁹⁹

2) KUB Bogam Raya

KUB Bogam Raya beralamat di Teluk Bogam RT. 04 Bapak Ahmad Aspuri adalah ketua KUB Bogam Raya. Menurut bapak Ahmad Aspuri, KUB Bogam Raya didirikan pada tingkat

⁹⁸ Wawancara bapak SK, pada tanggal 06 Juli 2020 pukul 09.45 wib

⁹⁹ *Ibid*

perkembangannya dari awal sampai sekarang sifatnya *stagnan* (tidak ada perubahan baru), bahkan tidak berjalan lagi.¹⁰⁰

Adapun tujuan dari dibentuknya KUB Bogam Raya adalah untuk mengurangi pengangguran. Usaha yang dikembangkan adalah perikanan tangkap. Kendala yang dihadapi dalam usaha KUB adalah alat tangkap yang kurang memadai dan iklim.¹⁰¹

3) KUB Bogam Sejahtera

KUB Bogam Sejahtera beralamat RT. 06 Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai. Bapak Suhairi (51 tahun) adalah ketua KUB Bogam Sejahtera. Menurut Bapak Suhairi KUB Bogam Sejahtera mulai terbentuk awal mulanya saat bergabung dengan unit koperasi, setelah koperasi tutup maka mereka berinisiatif membentuk KUB pada bulan September 2013.¹⁰²

Adapun tujuan dibentuknya KUB Nelayan Muda Mandiri adalah untuk meningkatkan pendapatan dan peralatan sendiri guna mencapai kesejahteraan. Adapun usaha yang dikembangkan terbagi dua yaitu: pertama, pihak bapak-bapak usaha tangkap ikan. Kedua, pihak ibu-ibu usaha ikan kering. Adapun Kendala yang dihadapi nelayan dalam pengembangan KUB adalah nelayan modren dengan alat tangkap trawl dan iklim.¹⁰³

4) KUB Mina Berkah

¹⁰⁰ Wawancara bapak AA, pada tanggal 07 Juli 2020 pukul 09.00 wib

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Wawancara bapak SH, pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.15 wib

¹⁰³ *Ibid*

KUB Mina Berkah terletak di RT. 07 Desa Teluk Bogam Kecamatan kumai didirikan oleh anggota kelompok nelayan yang diketuai oleh Bapak Sukma selaku ketua. Beliau memiliki anggota sebanyak 10 orang yang masih aktif dalam kegiatannya. Menurut pengakuan beliau awalnya terbentuknya kelompok ini karena mereka merupakan nelayan yang masih tradisional, yang mana mereka hanya memakai peralatan tradisional dalam menangkap ikan karena kurangnya pengetahuan mereka sering ketinggalan informasi terkait permodalan dan pemasaran.¹⁰⁴

Adapun tujuan umum Kelompok Mina Berkah ini yaitu meningkatkan kemampuan dan kualitas kelompok dari sisi pembinaan, pengelolaan, permodalan dan pengembangan usaha dalam pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai upaya meningkatnya pendapatan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁵

5) KUB Bina Sejahtera

KUB Bina Sejahtera di ketuai oleh bapak Masransyah hasil musyawarah pada hari Selasa tanggal 6 Oktober dalam bantuan perlengkapan alat tangkap nelayan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Wawancara bapak SK, pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 08.00 wib

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Wawancara bapak MR, pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 15.20 wib

Adapun tujuan sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah, baik Daerah maupun pusat dalam hal mensejahterakan masyarakat nelayan dengan pengajuan bantuan alat tangkap yang mempunyai bagi masyarakat nelayan Desa Teluk Bogam.¹⁰⁷

Adapun data kepengurusan KUB di atas masing-masing adalah sebagai berikut:



Tabel 4.2
Penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014

¹⁰⁷ *Ibid*

NO	Nama KUB	Alamat KUB	Pengurus Dan Anggota	
1.	Bogam Hijau	Jalan Said Husin Hamzah RT. 02 Desa Teluk Bogam	Syahlani (Ketua)	Hedi Kusmadi (Anggota)
			Syamsudin (Seketaris)	Darmandi (Anggota)
			Nurdin Bahri (Bendahara)	Rulianto (Anggota)
			Majid Abbas (Anggota)	Kaspul (Anggota)
			Bambang (Aanggota)	Abdul Main (Anggota)
2.	Bogam Raya	Teluk Bogam RT. 04 Kecamatan Kumai	Ahmad Aspuri (Ketua)	Harianto (Anggota)
			M. Ersad (Seketaris)	Dandi Saputra (Anggota)
			Yunus arnata (Bendahara)	Windu Suhardana (Anggota)
			Irwansyah (Anggota)	Kurnia Sandi (Anggota)
			Mustakim (Aanggota)	Leo Candra (Anggota)
3.	Bogam Sejahtera	Beralamat RT. 06 Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai.	Suhairi (Ketua)	Kusnadi (Anggota)
			Maslian (Seketaris)	Gozali Rahman (Anggota)
			Dani Arianda (Bendahara)	Arifin (Anggota)
			Syahrudin (Anggota)	Agus mianto (Anggota)
			Rizaldi (Aanggota)	Eko Melandri (Anggota)
4.	Mina Berkah	RT. 07 Desa Teluk Bogam Kecamatan kumai	Sukma (Ketua)	Hedi Kusmadi (Anggota)
			Indra lesmana (Seketaris)	Darmandi (Anggota)
			Nurdin Bahri	Rulianto

			(Bendahara)	(Anggota)
			Majid Abbas (Anggota)	Kaspul (Anggota)
			Debi lasana (Anggota)	
5.	Bina Berkah	Jalan Said Husin Hamzah RT. 08 Desa Teluk Bogam	Masransyah (Ketua)	Hedi Kusmadi (Anggota)
			Indra (Seketaris)	Darmandi (Anggota)
			Nurdin Bahri (Bendahara)	Rulianto (Anggota)
			Majid Abbas (Anggota)	Kaspul (Anggota)
			Debi lasana (Anggota)	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013

2. Faktor yang Melatari Kesuksesan dan Kegagalan dalam Pemberdayaan Melalui Program (PEMP)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program Pemberdayaan yang di rancang oleh pemerintah untuk masyarakat pesisir khususnya Pantai Jakat adalah program PEMP yang diberikan kepada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) itu telah dilaksanakan sejak tahun 2002. PEMP merupakan salah satu program unggulan dari departemen perikanan dan kelautan dalam rangka mengembangkan masyarakat pesisir yang mata pencarian bersumber dari eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Hal ini sesuai dengan pemaparan kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas yang di kuatkan oleh staff badan penyuluhan DKP kota, sebagai berikut:

“Program Pemberdayaan yang di rancang oleh pemerintah untuk masyarakat pesisir khususnya Pantai Jakat adalah program PEMP yang diberikan kepada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah dilaksanakan sejak tahun 2002. PEMP merupakan salah satu program unggulan dari departemen perikanan dan kelautan dalam rangka mengembangkan masyarakat pesisir yang mata pencarian bersumber dari eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan.”¹⁰⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa program yang dirancang oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Pantai Teluk Bogam adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang menjadi wadah para KUB dalam mendapatkan bantuan penambahan modal, pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan, meningkatkan harkat dan martabat kelompok.

Dalam sebuah pelaksanaan program tentunya adah factor pendukung maupun factor penghambat yang dapat mempengaruhi proses

¹⁰⁸ Wawancara Jurham efendy, staff badan penyuluhan DKP kota, 26 Juli 2020 pukul 09.45 wib

pelaksanaan suatu program, mengenai proses pelaksanaan program tersebut bapak JE menerangkan bahwa:

“Program PEMP ini rata-rata pengolahannya oleh mereka dan untuk mereka eksensinya, pengolahannya berbasis kelompok. Mereka punya lembaga yang beranggota minimal 10 orang, jadi semuanya mereka yang menentukan baik keberhasilan maupun kegagalanya”.¹⁰⁹

Beliau juga menjelaskan bahwa program tersebut sangat membantu para nelayan karena bantuan yang diterima kelompok nelayan didapat mereka secara cuma-cuma tanpa harus dikembalikan, hanya saja perlu adanya bukti pertanggung jawaban laporan anggaran dasar dan hasil pendapatan mereka setiap bulannya. Berikut pemaparan beliau:

“program ini cukup bahkan sangat membantu para nelayan karena bantuan yang di terima kelompok nelayan didapat mereka secara cuma-cuma, gratis tanpa harus dikembalikan, hanya saja mereka perlu membuat bukti pertanggung jawaban laporan anggaran dasar dan hasil pendapatan mereka setiap bulannya.”¹¹⁰

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak AA ketua nelayan KUB Bogam Hijau sebagai berikut:

“program PEMP bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini kami terima secara cuma-cuma dan langsung diterima oleh kelompok, namun ada bentuk pertanggung jawaban dari tiap kelompok seperti laporan anggaran dasar dan pendapatan kelompok perbulan.”¹¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, menggambarkan bahwa program yang ditawarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sangat membantu masyarakat Pesisir pantai Teluk Bogam khususnya nelayan KUB dan mampu meningkatkan animo masyarakat nelayan pesisir Teluk Bogam dalam aktivitas bernelayan.

¹⁰⁹ Wawancara JE, staff badan penyuluhan DKP kota, 26 Juli 2020 pukul 09.45 wib

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Wawancara Bapak AA, pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 15.47 wib

Adapun faktor pendukung berjalanya program tersebut menurut bapak kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu: 1) Kelembagaannya sudah berbentuk kelompok, 2) Dana disiapkan oleh pemerintah, 3) Pemerintah daerah juga menyiapkan dana pendamping pada kegiatan tersebut serta pemerintah pusat ikut monitoring evaluasi dengan adanya pendampingan. Berikut keterangan bapak kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut:

“Faktor pendukung berjalannya program ini adalah: 1) Kelembagaannya sudah berbentuk kelompok, 2) Dari sisi Pendanaan pemerintah menyiapkan, 3) Pemerintah daerah juga menyiapkan dana pendamping pada kegiatan tersebut serta pemerintah pusat ikut monitoring evaluasi dengan adanya pendampingan”.¹¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak JE sebagai berikut:

“Faktor pendukung dari program ini yang pertama adalah sudah adanya kelembagaannya yang berbentuk kelompok, kedua pendanaan sudah disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Kelautan dan perikanan, yang ketiga pemerintah daerah juga menyiapkan dana pendamping kegiatan serta pemerintah pusat juga melakukan monitoring evaluasi melalui pendampingan”.¹¹³

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kelompok yang lolos verifikasi menilai bahwa bantuan yang di berikan adalah hasil usaha mereka sendiri sehingga mereka tidak begitu bersemangat dalam memanfaatkan bantuan yang telah di terima. Gaya hidup yang sangat

¹¹² Wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, 2 Juli 2020 Pukul 09.00

¹¹³ Wawancara dengan bapak JE, staff badan penyuluhan DKP kota, 26 Juli 2020 pukul 09.45 WIB

konsumtif dan manajemen keuangan yang mereka miliki juga masih sangat buruk.¹¹⁴

Pernyataan tersebut diamini oleh bapak HS Staff desa Teluk Bogam yang menyatakan bahwa:

“Hambatan dalam program pasti ada, namanya program bantuan tidak semua kelompok nelayan mendapat bantuan hanya beberapa kelompok mendapat bantuan. Hambatan utama yaitu kelompok yang mendapatkan dana bantuan untuk yang lolos verifikasi pemikiran mereka masih beranggapan bahwa bantuan yang di berikan seolah olah hasil usaha mereka sendiri tidak ada upaya yang luar biasa dari mereka dalam memanfaatkan bantuan yang telah di terima. Selain itu pola gaya hidup kelompok seperti Boros, yaitu tingkat konsumtif yang masih sangat tinggi dan hambatan yang terakhir yaitu manajemen keuangan yang buruk”¹¹⁵

Selain itu bapak HS juga menerangkan bahwa:

“Hambatan juga timbul di akibatkan karena pendampingan dari pemerintah yang harusnya rutin dilakukan tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga manajemen yang dilakukan oleh para KUB menjadi kurang baik atau bias dikatakan buruk sehingga manfaat yang harusnya bias dirasakan dalam jangka Panjang tidak terjadi dan pada imbasnya tujuan dari PEMP itu sendiri tidak tercapai”¹¹⁶
Pernyataan yang disampaikan oleh bapak HS tersebut juga

disampaikan oleh salah satu ketua KUB yang menyatakan bahwa:

“bantuan yang diberikan tidak merata seakan terkesan tebang pilih dalam memberikannya, selain itu kami terkendala dari segi pengelolaan, karena tidak ada pendampingan dari pihak dinas terkait yang seharusnya dilakukan jadi pemanfaatan bantuan yang ada menjadi kurang maksimal”¹¹⁷

Hal tersebut juga diamini oleh salah satu anggota KUB yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan terkesan ditutup-tutupi atau

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Wawancara dengan bapak HS Staff desa Teluk Bogam 29 Juli 2020 pukul 10.30 WIB

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Wawancara dengan bapak SH Staff desa Teluk Bogam 29 Juli 2020 pukul 14.20 WIB

tidak transparan bahkan hanya yang dekat saja yang dapat dengan mudah mendapatkan bantuan tersebut¹¹⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak IW salah satu anggota KUB yang menerangkan:

“Bantuan ini menurut saya gak tepat sasaran karena yang dapat malah yang gak bisa melaut yang bisa dan menguasai malah gak dapat, dan yang dapat itu ya yang deket-deket aja sama mereka, selain itu dari ketua kami juga kadang-kadang gak ngomong kalo ada bantuan jadi ya dipakai sendiri aja sama dia”¹¹⁹

Pernyataan senada juga disampaikan oleh bapak DA yaitu:

“Kalo masalah bantuan ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kami tapi petugas penyalurannya dan proses penyalurannya ini yang saya gak suka, karena tebang pilih, yang seharusnya dapat gak dapat yang seharusnya gak dapat malah dapat, terus pihak dinas juga langsung lepas tangan gitu aja gak ada action nya, seperti di monitor atau di evaluasi atau gaimana, jadi setelah dapat ya habis gitu aja nanti dapat lagi ya gitau lagi. Jadi yang kami harapkan itu bantuan plus pembinaanya.”¹²⁰

Mengenai hal tersebut penulis melakukan penelusuran dokumen pendukung hasil penelitian yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh subjek tersebut, dari hasil penelusuran tersebut memang benarpengulis tidak menemukan dokumen apapun yang dapat menguatkan adanya pendampingan dari pihak dinas terkait. Selain itu selama penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 2 bulan penulis juga tidak pernah menemui

WIB ¹¹⁸ Wawancara dengan bapak NB anggota KUB Bogam Hijau 30 Juli 2020 pukul 08.00

WIB ¹¹⁹ Wawancara dengan bapak IW anggota KUB Bogam Raya 30 Juli 2020 pukul 10.00

WIB ¹²⁰ Wawancara dengan bapak GR anggota KUB Bogam Raya 30 Juli 2020 pukul 14.00

utusan dari dinas terkait yang bertugas memonitoring atau bertugas mengevaluasi para KUB di Desa Teluk Bogam.

Peneliti memberi pertanyaan seputar kabar yang beredar tentang dana bantuan yang sifatnya tebang-pilih. Mengenai hal tersebut bapak JE mengklarifikasi pernyataan tersebut dengan menerangkan bahwa:

“namanya sebuah program untuk mendapatkan bantuan harus diseleksi dan diverifikasi cukup ketat jadi tidak semua bisa mendapatkan bantuan. Dana bantuan Tebang-pilih tidak ada, yang ada itu keterbatasan dana. Dana bantuan terbatas jumlahnya”¹²¹

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa program PEMP dapat diketahui bentuk bantuannya bervariasi dan tidak ada yang namanya tebang-pilih yang ada dananya terbatas. Program tersebut ditawarkan pada masyarakat agar dapat mengenai sasaran demi kemajuan yang diinginkan bersama dan program PEMP telah berjalan dengan baik dalam memberdayakan masyarakat pesisir.

Akan tetapi berdasarkan temuan peneliti yakni mengenai data penerimaan bantuan program PEMP diketahui bahwa ada warga yang berturut-turut mendapatkan bantuan padahal berdasarkan kriteria menurut penulis warga tersebut tidak berhak menerima bantuan tersebut dan ada warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan padahal secara kriteria sangat membutuhkan bantuan. hal ini peneliti analisis berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh nelayan tersebut dan kemampuan ekonomi yang dimiliki masing masing nelayan. Dari segi proposal pengajuan

¹²¹ Wawancara dengan bapak JE, staff badan penyuluhan DKP kota, 26 Juli 2020 pukul 09.45 WIB

bantuan dan persyaratan keduanya sudah sama-sama memenuhi syarat verifikasi.¹²²



¹²² Observasi 1-30 juli 2020

C. Pembahasan

1. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP).

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwa PEMP didirikan sejak tahun 2020 dan tujuan didirikannya PEMP sendiri adalah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan diwilayah pesisir Teluk Bogam dan pengembangan usaha masyarakat pesisir berbasis sumberdaya lokal, sasaran utamanya adalah masyarakat pesisir Teluk Bogam sendiri yang memiliki skala usaha mikro yang berorientasi pada sektor perikanan dan kelautan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan jasa bahari). Selain itu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir juga memberikan pembelajaran kepada nelayan diwilayah pesisir untuk memperoleh informasi tentang lembaga keuangan untuk memfasilitasi lembaga ekonomi pembangunan pesisir. Program PEMP sendiri dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu periode inisiasi, periode institusionalisasi dan periode deversifikasi. Berdasarkan keterangan beberapa sumber juga diketahui bahwa terdapat 3 tujuan utama didirikannya Program PEMP yaitu:

- a) Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.

- b) Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
- c) Pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Untuk mengetahui mengenai keberhasilan pola pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Bogam kita harus melihat dari beberapa aspek di antaranya adalah aspek Ekonomi, Pendidikan, Agama, dan politik.

a. Ekonomi

Dari aspek ekonomi ini hal yang perlu di perhatikan menyangkut mengenai pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi, berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa masyarakat desa Teluk Bogam memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha melaut dan keterampilan terhadap penangkapan ikan, pada dasarnya masyarakat Desa Teluk Bogam dinilai memiliki potensi sumber daya kelautan yang dapat dijadikan andalan pembangunan daerah. Akan tetapi potensi sumber daya kelautan tersebut masih belum dapat di manfaatkan dengan baik sehingga potensi tersebut belum dapat melepaskan masyarakat desa Teluk Bogam dari jeratan kemiskinan. Berdasarkan keterangan beberapa pihak terutama pihak dinas terkait menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal

mungkin untuk mewujudkan agar masyarakat pesisir pantai Teluk Bogam dapat terlepas dari jerat kemiskinan, kenyataannya belum membawa hasil yang optimal sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.

Kehidupan nelayan khususnya masyarakat pesisir Pantai Teluk Bogam sangat memprihatinkan, mereka adalah nelayan tradisional yang memakai perahu motor dan alat-alat tangkap sederhana. Pada umumnya nelayan desa Teluk Bogam masih mengalami ketergantungan dan keterbatasan terhadap teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap sederhana, wilayah operasi menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai. Ketergantungan terhadap musim juga sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama saat musim ombak yang bisa berlangsung sampai lebih dari satu bulan. Akibatnya dengan keterbatasan modal, kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki, pada musim tertentu tidak ada tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi tersebut merugikan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan perbulan menjadi lebih kecil dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik.

Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat nelayan Teluk Bogam adalah yang terkait dengan produksi merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan selain masalah pemasaran, alat tangkap dan modal. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut, nelayan berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapnya dan meminjam uang kepada pemilik modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan tetapi, berbagai upaya yang dilakukan oleh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya telah menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan pada posisi lemah.

Seperti halnya fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat nelayan pesisir pantai desa Teluk Bogam faktor utama akar kemiskina tidak sepenuhnya terjadi karena ketidakmampuan menghidupi kebutuhan sehari-hari tetapi masih lemahnya etos kerja nelayan dalam mengembangkan dan memanfaatkan swadaya dan swadana yang di fasilitasi serta gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan, yang menyebabkan dari beberapa masyarakat nelayan terindikasi mengalami kemiskinan kultural.¹²³ Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Koesnadi yang menyatakan bahwa kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang muncul adanya sebagai akibat nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, pemanfaatan waktu yang tidak efektif, cepat puas dengan hasil yang dicapai hari ini, tidak punya tabungan dan masih

¹²³Observasi terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan di desa teluk bogam pada tanggal 15-Januari 2020.

mempercayai hal yang tabuh dan pantang dalam berproses menjalani usaha.¹²⁴

Mayarakat nelayan desa Teluk Bogam hingga saat ini sebagian besar masyarakatnya masih termasuk kedalam golongan masyarakat yang tertinggal. Padahal dalam data BPS wilayah pesisir desa Teluk Bogam merupakan salah satu desa produktif dalam hasil laut diantara 6 desa pesisir pantai di kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.¹²⁵

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 33.332 jiwa (9.842) kepala keluarga, desa Teluk Bogam merupakan salah satu katagori dari desa miskin tersebut.¹²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf “My” di kantor Desa Teluk Bogam di ketahui bahwa jumlah keluarga yang tercatat sebagai keluarga miskin di Teluk Bogam adalah sebanyak 153 kepala keluarga dari 423 kepala keluarga atau sebesar 36.17 % dari jumlah penduduk yang ada, keadaan ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yakni keluarga miskin sebanyak 149 kepala keluarga dari 423 kepala keluarga atau 35.22 % dari jumlah penduduk yang ada.

¹²⁴Koesnadi, *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, 2004, h. 121.

¹²⁵BPS Desa Teluk Bogam h. 5 lihat di <http://kobarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 11-10-2017.

¹²⁶BPS Kotawaringin Barat lihat di <http://kobarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 2- 6-2018.

Keadaan kemiskinan ini dapat dikatakan sangat tinggi mengingat potensi yang ada di Teluk Bogam itu sendiri.¹²⁷

Kadaan kemiskinan di desa Teluk Bogam ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi di desa Teluk Bogam sangat rendah atau dapat dikatakan apa yang telah di usahakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Teluk Bogam telah gagal.

Selam ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan yang berbentuk fisik seperti bantuan alat tangkap dan tranportasi laut saja yang digalakan. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang penulis lakukan bahwa tak hanya itu saja yang masyarakat desa Teluk Bogam Butuhkan, melainkan bantuan dalam hal pembinaan sumber daya manusia yang harus di utamakan karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menggali kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat mempunyai dapat meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah

¹²⁷ Wawancara dengan bapak “My” pada pukul 20.15 hari Kamis, 16 April 2020

pengembangan dan pemberdayaan umat islam khususnya, sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ¹²⁸

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹²⁹

Dari ayat di atas ada indikasi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka (kaum) selama mereka (kaum) tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka, maksudnya Allah menyuruh atau mengajak kita agar mau berusaha dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak lengah dan mudah putus asa yang mana pada dasarnya Allah tidak akan memberikan cobaan atau musibah kepada hambanya diluar kemampuan dan Allah tidak merubah nasib hambanya selama hamba tersebut tidak mau berusaha dan bertindak yang lebih baik lagi. Allah juga akan murka dan marah pada hambanya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan hanya pasrah saja dalam menghadapi

¹²⁸ Q.S Ar-Rad [13]:11

¹²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 1987, h. 251.

permasalahan yang ada. Dengan ini diharapkan masyarakat nelayan mampu untuk berusaha hidup agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Akan tetapi hal yang sangat dibutuhkan tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah melainkan hanya memberikan bantuan saja, yang setelah selesai tanpa ada pengarahan dan pembinaan sehingga bantuan yang diberikan tidak dapat merubah keadaan ekonomi masyarakat desa Teluk Bogam sehingga masyarakat Desa Teluk Bogam terus berada di bawah Garis kemiskinan.

b. Pendidikan

Beberapa Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Meskipun demikian, tidak jelas faktor mana yang muncul lebih dulu, apakah perkembangan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya. Terhadap permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan.

Pendidikan secara universal berarti upaya perubahan manusia menjadi lebih cerdas, yang dalam konsep filsafat

pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kecerdasan di sini jangan ditafsirkan sebagai kecerdasan kognitif atau intelektual belaka, tapi kecerdasan manusia yang seutuhnya, kecerdasan total manusia dalam berbagai bidang kehidupannya.

Menurut CEO Lippo Group yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pendidikan dan Kesehatan, James Riady menyatakan bahwa Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang harus menjadi prioritas pemerintah karena keduanya berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tegasnya. Jika suatu negara tidak memiliki pendidikan maka akan menjadi negara terbelakang. Sama halnya dengan kesehatan, jika masyarakatnya sakit-sakitan maka negara tersebut akan tertinggal.¹³⁰

Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di desa Teluk Bogam bahwa hampir semua masyarakat pesisir yang berkerja sebagai nelayan maupun tengkulak hanya memiliki Pendidikan tingkat SMA saja dan bahkan banyak warganya yang tidak lulus sekolah, para orang tua di desa pesisir desa Teluk Bogam lebih mementingkan memberikan pelajaran kepada anaknya tentang bagaimana cara menangkap ikan yang benar, sehingga hampir semua masyarakat desa Teluk Bogam bergantung

¹³⁰ Ridho Syukro, <https://www.beritasatu.com/heru-andriyanto/ekonomi/467939/pendidikan-dan-kesehatan-kunci-pertumbuhan-ekonomi>, Selasa 1 September 2020

pada kegiatan melaut saja, hal ini mengakibatkan perekonomian masyarakat desa Teluk Bogam sangat memprihatinkan apalagi pada saat musim paceklik tiba. Tingkat Pendidikan masyarakat desa Teluk Bogam secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Table 4.2
Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Bogam

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan			
			SD	SMP	SMA	Univ
1	Laki-laki	718	272	289	157	-
2	Perempuan	699	324	247	128	-

Menurut Vizey yang dikutip oleh Apriyanti Widiansyah bahwa pendidikan merupakan human capital yang memiliki dua aspek, yaitu yang pertama pendidikan merupakan suatu bentuk investasi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern, yang kedua pendidikan diharapkan menghasilkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan nyata.¹³¹ Dengan demikian dengan lemahnya tingkat Pendidikan masyarakat Desa Teluk Bogam maka untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan akan sangat sulit dicapai, untuk mencapai peningkatan ekonomi di desa Teluk Bogam seharusnya ditunjang dengan peningkatan kualitas SDM yang ada, sehingga

¹³¹ Apriyanti Widiansyah. Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi, Cakrawala, Vol. XVII, No. 2, September 2017, h. 210

dengan tingginya kualitas SDM maka masyarakat tidak lagi harus bergantung pada hasil tangkapan laut yang ada, masyarakat akan lebih inovatif dan dapat memanfaatkan sumberdaya alam lainnya.

c. Politik

Variabel-variabel politik merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika perekonomian sebuah daerah maupun suatu negara. Faktor politik bisa berpengaruh melalui berbagai aspek yang menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti investasi sumber daya manusia dan infrastruktur, perbaikan institusi politik dan hukum.

Politik dan ekonomi ialah dua hal yang saling berhubungan erat, sehingga mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya. Penjelasannya sederhana, jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan menguntungkan pemilihnya. Misalnya, bagaimana politisi itu bisa meyakinkan pemilih bahwa ketika dia berkuasa harga pangan murah, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain. Bagaimana politisi mencapai indikator-indikator ekonomi itu. Untuk memahami indikator-indikator ekonomi dengan baik, maka back-up yang kuat dari tim ekonomi sangat diperlukan. Isu-isu ekonomi apa yang hendak diangkat harus dipikirkan mendalam dan berdasarkan fakta dan data yang ada. Tim ekonomi paling tidak, pernah mendapatkan

mata kuliah mikroekonomi dan makroekonomi. Sehingga, pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana ekonomi bekerja.

Di tahun politik yang intensitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap indikator-indikator ekonomi menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi para politisi. Bagi partai oposisi, isu-isu ekonomi dapat diangkat untuk mengkritisi pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa. Bagi incumbent, kinerja ekonomi menentukan seberapa besar keberhasilan partai incumbent itu untuk berkuasa kembali. Siapa pun itu, masyarakat hendaknya disajikan debat ekonomi yang berkualitas, bukan isu ekonomi yang digoreng untuk kepentingan sesaat.

Begitu juga dengan yang terjadi di Desa Teluk Bogam di mana masyarakat hanya di cekoki dengan janji-janji yang akan diberikan bagi para pendukung, sehingga menjadikan masyarakat terbelah, tak hanya itu saja berdasarkan keterangan dari berbagai sumber yang telah penulis dapatkan diketahui bahwa program Bantuan PEMP bagi nelayan Desa Teluk Bogam pun masuk dalam sasaran para politisi, sehingga barang siapa masyarakat yang mendukung suatu pasangan calon atau anggota dewan yang secara kebetulan dapat melenggang, maka golongan masyarakat tersebut

dapat dengan mudah mendapatkan bantuan program PEMP tersebut, dan bagi yang tidak mendukung akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kabar tentang tujuan PEMP tersebut? Jawabannya sudah dapat dipastikan tujuan diadakannya program bantuan PEMP tersebut menjadi angin yang hilang beriring hilangnya tahun politik, dan keadaan masyarakat pesisir desa Teluk Bogam pun akan tetap sama, menjadi masyarakat yang miskin dengan serba kekurangannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Petrakoset yang dikutip oleh Catur Sugiyanto dkk yang menyatakan bahwa faktor politik bisa berpengaruh melalui berbagai aspek yang menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti investasi sumber daya manusia dan infrastruktur, perbaikan institusi politik dan hukum.¹³²

Artinya kegiatan politik akan dapat berpengaruh terhadap ekonomi apabila tidak disalah gunakan dan dilaksanakan sesuai koridor akan tetapi akan menjadi boomerang pada sector ekonomi masyarakat bila disalah gunakan.

Pemberdayaan masyarakat sendiri sebenarnya mengacu pada “*empowerment*” yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat, pendekatan pemberdayaan masyarakat

¹³² Catur Sugiyanto, dkk, Pengaruh Konsentrasi Partai Politik di Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13 No. 2, Januari 2013, h. 111

dalam lingkup masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal, yang mandiri, sebagai sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (*actor*) yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) kemudian melandasi wawasan sumberdaya lokal (*community-based resources management*) merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran social (*social learning*) dan strategi perumusan program, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan (*empowerment*) potensi ekonominya.¹³³

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir Desa Teluk Bogam bertujuan untuk memberikan bantuan penambahan modal, pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Desa Teluk Bogam.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah

¹³³Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h.51

pesisir ditujukan untuk pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan, yang dilakukan dengan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga akhirnya tercipta lapangan kerja atau wirausaha baru, dan didukung peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir secara umum dapat dirumuskan dalam bidang, Pengetahuan, ketrampilan, Permodalan, Penguasaan teknologi dan manajemen.¹³⁴

Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga diketahui tujuan lain dari pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Bogam adalah mengusahakan membentuk masyarakat Desa Teluk Bogam menjadi masyarakat yang mandiri baik kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Eko Widodo yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas

¹³⁴ *Ibid*

kemampuan *kognitif, konatif, psikomotorik* dan *afektif* dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup terciptanya lapangan kerja dan kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.¹³⁵

Eko Widodo juga menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan. *Human capital teory*, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.¹³⁶

¹³⁵Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015 ,h. 203.

¹³⁶Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, , h. 3-4.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pola pemberdayaan masyarakat pesisir desa Teluk Bogam melalui program pengembangan PEMP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan melalui penguatan kelembagan masyarakat pesisir diperkenalkan untuk berorganisasi mulai dari sistem manajemen pengembangan usaha produktif (Kelompok Usaha Bersama /KUB) dan sumberdaya pesisir mulai dari perencanaan rencana aksi kegiatan, implementasi kegiatan, serta menumbuh kembangkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Mulyadi yang menyatakan bahwa pola pengembangan PEMP adalah model pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui PEMP menganut prinsip *to help them to help themselves*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Program PEMP mendorong masyarakat pesisir berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan melalui penguatan kelembagan masyarakat pesisir diperkenalkan untuk berorganisasi mulai dari sistem manajemen pengembangan usaha produktif (Kelompok Usaha Bersama /KUB) dan sumberdaya pesisir mulai dari perencanaan

rencana aksi kegiatan, implementasi kegiatan, serta menumbuh kembangkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.¹³⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program PEMP menyangkut tujuan dan rumusan kebijakannya sudah sangat baik akan tetapi berdasarkan hasil lapangan dilihat dari aspek ekonomi, Pendidikan dan Politik semuanya tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat menimbulkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat pesisir Desa Teluk Bogam.

2. Faktor yang Melatari Kesuksesan dan Kegagalan Dalam Pemberdayaan Melalui Program (PEMP)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program Pemberdayaan yang di rancang oleh pemerintah untuk masyarakat pesisir adalah program PEMP yang diberikan kepada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) itu telah dilaksanakan sejak tahun 2002. PEMP merupakan salah satu program unggulan dari departemen perikanan dan kelautan dalam rangka mengembangkan masyarakat pesisir yang mata pencarian bersumber dari eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Dengan demikian program yang ditawarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sangat membantu masyarakat Pesisir pantai Teluk Bogam khususnya nelayan

¹³⁷Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, ... h.144

KUB dan mampu meningkatkan animo masyarakat nelayan pesisir Teluk Bogam dalam aktivitas bernelayan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor pendukung berjalanya program yaitu:

- a. Kelembagaannya sudah berbentuk kelompok.
- b. Dana disiapkan oleh pemerintah.
- c. Pemerintah daerah juga menyiapkan dana pendamping pada kegiatan tersebut serta pemerintah pusat ikut monitoring evaluasi dengan adanya pendampingan.

Sedangkan faktor yang dapat menghambat jalan program pemp adalah:

- a. Bantuan tidak merata atau terkesan tebang pilih.
- b. Kelompok yang lolos verifikasi beranggapan bahwa bantuan yang di berikan adalah hasil usaha mereka sendiri sehingga tidak ada upaya yang luar biasa dari mereka dalam memanfaatkan bantuan yang telah di terima.
- c. Pola gaya hidup kelompok masih sangat konsumtif atau terkesan boros yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural
- d. Managemant keuangan yang buruk.
- e. Tidak dilakukan pendampingan dari pemerintah yang harusnya rutin dilakukan sehingga terjadi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan manajemen yang dilakukan oleh para KUB menjadi kurang baik atau bisa dikatakan buruk yang menjadi akar terjadinya kemiskinan secara structural.

Dalam sebuah pelaksanaan program tentunya ada factor pendukung maupun factor penghambat yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan suatu program begitu juga pada program PRMP Desa teluk Bogam. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan program PRMP adalah factor penghambat, bisa juga disebut masalah atau problem. Masalah sendiri menurut Prajudi Atmosudirjo, masalah merupakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang di harapkan, direncanakan dan ditentukan untuk dicapai sehingga masalah merupakan rintangan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan.¹³⁸

Apa yang dikemukakan Prajudi Atmosudirjo di atas sangat sesuai dengan hasil temuan peneliti bahwa terjadi penyimpangan antara apa yang di harapkan dan direncanakan dari diadakanya PEMP. Sehingga menjadi sebuah rintangan atau tantangan untuk tercapainya tujuan dari diadakanya PEMP.

Hasil temuan penelitian juga sesuai dengan yang dikemukakan Notoadmojo, bahwa masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataannya.¹³⁹ Temuan penelitian sangat jelas menyatakan bahwa terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi

¹³⁸ <https://www.pelajaran.id/2017/09/pengertian-masalah-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-masalah-terlengkap.html>, online senin 10 Agustus 2020

¹³⁹ *Ibid*

dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataannya, di mana kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terjadi dengan diadakannya PEMP di Desa Teluk Bogam, sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor utama yang menghambat implementasi program PEMP adalah berasal dari para penerima program PEMP di mana kelompok yang lolos verifikasi menilai bahwa bantuan yang di berikan adalah hasil usaha mereka sendiri sehingga mereka tidak begitu bersemangat dalam memanfaatkan bantuan yang telah di terima. Gaya hidup yang sangat konsumtif dan managemant keuangan yang mereka miliki juga masih sangat buruk. Berdasarkan penelitian juga diketahui bahwa penyebab utama timbulnya problem tersebut adalah dikarenakan pendampingan dari pemerintah yang harusnya rutin dilakukan tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga manajemen yang dilakukan oleh para KUB menjadi kurang baik atau bisa dikatakan buruk sehingga manfaat yang harusnya bisa dirasakan dalam jangka panjang tidak terjadi dan imbasnya tujuan dari PEMP itu sendiri tidak tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahi bahwa keadaan pihak dinas terkait yang kurang fair dalam menentukan penerima program PEMP juga menyebabkan masyarakat pesisir merasa malas

untuk bersungguh-sungguh melaksanakan program PEMP karena saat mereka bersungguh-sungguh terkadang bantuan yang diharapkan tidak kunjung tersalurkan, justru masyarakat yang tidak bersungguh-sungguh bahkan KUB nya sudah tidak berjalan lagi kepngurusanya bisa mendapatkan bantuan dari program PEMP tersebut, yang ujung-ujungnya akan digunakan untuk keperluan pribadi buakan kelompok. Beberapa anggota KUB banyak yang mengeluhkan mengenai hal tersebut mereka beranggapan bahwa pemerintah atau dinas terkait tebang pilih dalam penyaluran bantuan program PEMP tersebut, di mana yang merasa dekat denngan petugas maka akan mendapatkan bantuan tersebut.

Diketahui bahwa menurut Arif Rohman ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam inplementasi kebijakan yaitu, Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepertaian masingmasing. Semua itu

akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Sedangkan yang terakhir yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.¹⁴⁰

Sudah menjadi fitrah setiap manusia menginginkan sebuah kemenangan, keberuntungan dan kesuksesan. Tidak ada seorang manusiapun yang mengharapkan kekalahan, kerugian atau kegagalan. Akan tetapi, kesuksesan atau kegagalan itu sendiri adalah pilihan manusia sesuai jalan yang ditempuhnya. Jika saja seseorang menempuh jalan kemenangan, maka diapun akan sampai kepada kemenangan. Namun, jika seseorang mengikuti jalan kegagalan, maka diapun akan sampai kepada kegagalan. Di dalam al-Qur'an, Allah swt. menyebutkan kegagalan dengan kata fasyala. Ketika kata fasyala disebutkan Allah, ada isyarat khusus yang bisa ditangkap tentang penyebab atau jalan yang mengantarkan manusia kepadanya. Di antara ayat yang berbicara kegagalan dan penyebabnya adalah; Pertama, surat Ali 'Imran [3]: 152:

¹⁴⁰ Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2009, h. 147

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أُرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِّنكُمْ
مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman.

Dalam ayat di atas, kegagalan dikaitkan dengan kata pertikaian (*tanâza'tum*) dan kata pembangkangan (*'ashaitum*). Kedua hal itulah yang menjadi penyebab utama kegagalan. Inilah juga yang pernah terjadi dalam perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan karena sebagian sahabat bertikai dan membangkang pesan Rasulullah.

Dalam kehidupan pribadi seseorang, juga berlaku bahwa berbeda, bertikai dan menantang arus serta tidak mau patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku akan menjadikan seseorang mengalami kekalahan dan kegagalan. Seorang siswa misalnya, jika selalu menyalahi dan membangkang terhadap segala macam bentuk aturan, tantulah akan mengalami kegagalan dalam studinya.

Begitu juga, dalam kehidupan kelompok dan masyarakat dengan sangat mudah bisa dibuktikan betapa pertikaian dan pembangkangan terhadap aturan akan menjadikan kelompok dan

masyarakat tersebut menderita kekalahan, kegagalan serta kehanacuran. Seperti halnya yang terjadi pada proses penyaluran bantuan di desa Teluk Bogam tersebut di mana para petugas pemerintah tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kerabatnya sehingga mengakibatkan kegagalan dari program PEMP di Desa Teluk Bogam tersebut, tak hanya itu kegagalan dan sikap pemimpin yang tidak mematuhi atauran mengakibatkan kecurigaan antar kelompok masyarakat yang apabila di biarkan terus meneruas akan berujung pada sebuah pertikaian. Padahal Allah SWT telah memberikan janji kesuksesan bagi umat manusia yang menjalankan pekerjaannya dengan kebaikan dan sesuai tuntuan agama sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam ayat ini, Allah menjanjikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan berlipat di akhirat ketika seorang memilih jalan keimanan dan berbuat baik. Islam bukan agama ritual saja yang menghabiskan umur hanya di dalam mihrab saja. Islam sangat

memperhatikan kehidupan dunia, walaupun selalu diingatkan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

Jadi apa bila pelaksanaan program bantuan PEMP di laksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan perintah agama maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan yang baik di dunia, dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya kelak di akhirat.

Dari hasil penelitian di atas dan apa yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi atau pelaksanaan program adalah terletak pada faktor yang mempengaruhi implementasi poin ketiga, yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

3. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam Melalui Program Pemberdayaan (PEMP) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mempelajari perilaku manusia yang sesuai dengan tuntutan pada landasan syariah (Al-Qur'an dan Hadist) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falah*). Islam sebagai agama Allah,

mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian-bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya.¹⁴¹

Mengenai pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam, sudahlah tentu harus ditinjau terlebih dahulu dari segi *maslahah* (kemaslahatan), apa bila pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) mengandung maslahat maka bisa dikatakan bahwa pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) terhindar diri dari segala yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan

¹⁴¹Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 3.

kemaslahatan sendiri, aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan dengan menghindari diri dari segala yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.¹⁴²

Untuk membedah hasil penelitian ini mengenai pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) dalam perspektif ekonomi Islam dapat kita lakukan dengan beberapa teori seperti di bawah ini:

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/ menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/ aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹⁴³

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa dalam menentukan penerima bantuan progam PEMP pihak terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dinilai tidak adil, menurut

¹⁴²Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar, ... h. 6.

¹⁴³*Ibid*,

keterangan masyarakat setempat, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan terkesan tebang pilih dalam menentukan siapa yang memperoleh bantuan program PEMP tersebut, hanya masyarakat atau nelayan yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak-pihak terkait tersebut yang mudah mendapatkan bantuan program PEMP tersebut.

Hasil temuan penelitaian tersebut tidak sesuai dengan makna keadilan yang sebenarnya di mana keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Termuat dalam (QS. An-Nisaa 4:58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁴⁴

Dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.(Q.S. An-Nisa': 135)¹⁴⁵

¹⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 113.

¹⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h.131

Jadi berdasarkan uraian di atas maka penetapan pemberian bantuan program PEMP Desa Teluk Bogam tidak memenuhi syarat keadilan sehingga bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh para petugas dinas terkait tidak adil atau tidak *fair* krena sesuai hasil penelitian dalam menentukan penerima bantuan cendrung tidak tepat sasaran yaitu orang yang berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan hanya yang memiliki kedekatan khusus saja yang menerima bantuan.

b. Teori Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Teori transparansi yang terkait dengan penelitian ini yakni dengan menggunakan tiga asas, yakni asas keadilan, asas keridhaan dan asas kejujuran.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa dalam pemberian bantuan program PEMP pihak dinas terkait tidak terbuka menjelaskan antara kesalahan ataupun kekurangan persyaratan yang diberikan, mereka hanya memberikan pernyataan tidak lolos verifikasi padahal persyaratan yang diajukan antar pihak yang memperoleh dan pihak yang tidak memperoleh sudah

jelas kesamaanya dan tidak ada perbedaan. Berdasarkan keterangan beberapa responden menjelaskan bahwa pemerintah seakan menutup-nutupi mengenai siapa yang lolos verifikasi, seakan tidak mau pihak masyarakat mengetahui. Bantuan yang diberikan pun langsung keluar tanpa ada kejelasan bagi pihak yang tidak memperoleh. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa banyak warga yang berturut-turut mendapatkan bantuan dan ada warga yang tidak pernah mendapat bantuan samsekali.

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menyatakan bahwa berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.¹⁴⁶ Kemudian UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

¹⁴⁶ Farid Hamid dan Heri Budianto, Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 331.

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁴⁷

Temuan hasil penelitian di atas sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang tersebut di mana pihak dinas terkait tidak memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat pesisir Desa Teluk Bogam yang mana masyarakat berhak mendapatkan informasi secara jelas dan utuh mengenai bantuan program PEMP yang ada, baik mengenai alasan memperoleh maupun alasan tidak memperoleh bantuan tersebut. Sehingga masyarakat merasa puas dan tidak terjadi kegaduhan ditengah masyarakat.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan karakteristik dari *Good Governance* di mana transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.¹⁴⁸

Menurut Sedarmayanti transparansi sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara

¹⁴⁷ *Ibid.*, 332.

¹⁴⁸ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, h. 14

pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.¹⁴⁹ berdasarkan hasil temuan penelitian apa yang disampaikan Sedarmayanti ini juga tidak di temukan karena tidak adak kebijakan terbuka terhadap pengawasan, tidak ada akses informasi yang jelas sehingga masyarakat tidak dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan tidak berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga eksekutif dan legislatif)

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa tak hanya dari pihak dinas terkait yang menutup-nutupi bantuan tersebut, bahkan dari ketua KUB pun juga menutup-nutupi mengenai bantuan yang diperoleh dari program PEMP dari anggotanya yang pada ujungnya bantuan tersebut akan digunakan secara pribadi oleh ketua KUB tersebut.

Hal ini juga bertentangan dengan penjelasan sebelumnya dan juga bertentangan dengan apa yang disampaikan Krina bahwa indikator dari transparansi adalah penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.¹⁵⁰ Di

¹⁴⁹ Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 289-290

¹⁵⁰ Krina L.P.L, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003, h. 17

mana informasi dari pemerintah benar-benar tertutup terhadap masyarakat bukan hanya dari pihak pengelola di pemerintahan bahkan ketua KUB yang mereka percaya pun tidak transparan.

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan *shiddiq* (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am:152)

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian teori di atas maka Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) tidak mengandung unsur transparansi baik dari dinas terkait kepada masyarakat maupun dari pihak ketua KUB kepada anggota karena penyaluran bantuan PEMP tidak memenuhi tiga aspek transparansi, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* (antar

lembaga eksekutif dan legislatif). Sehingga tujuan dari transparansi yang menghendaki membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan public tidak terwujud, yang ada malah kecurigaan antara masyarakat terhadap pemerintah dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

c. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁵¹

Maṣlahah sebagai *ḥujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahādah asy-syar'i*) terhadap *maṣlahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *maṣlahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga macam, yaitu *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya. *Maṣlahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maṣlahah* dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah* ini merupakan *ḥujjah* (landasan hukum). *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah almu'tabaroh*. Kedua *Maṣlahah* yang

¹⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 345-346.

terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/ menolaknya. *Maṣlahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan nas. *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah almulgah*. Ketika *maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu. *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah al-mursalah*.¹⁵²

Ada tiga syarat dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai *hujjah* (sumber hukum), yaitu: 1) kemaslahatan itu haruslah yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan; 2) kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak; dan 3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau *ijma*.¹⁵³

Berdasarkan hasil penelitian Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program

¹⁵²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011, h. 316.

¹⁵³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul "Ilmu Uṣūl Fikih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-9, 1977, h. 113-

114. Lihat juga Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2008, h. 152-153.

pemberdayaan (PEMP) berdasarkan tujuan dan manfaat yang diperoleh bagi penerima program bantuan PEMP sangat mengandung *Maşlahah* kerana tujuannya dari program bantuan PEMP adalah 1) Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir; 2) Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan; 3) pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah. Dengan tujuan program tersebut tentunya akan sangat memberikan *Maşlahah* bagi masyarakat atau penerima bantuan, akan tetapi pada proses penyaluran bantuannya keadaan menjadi berbalik karena banyak sekali mengandung mudharat yang dapat mengurangi atau bahkan meniadakan *Maşlahah* dari program PEMP tersebut. Mudharat yang terjadi pada proses penyaluran bantuan tersebut diantaranya adalah tidak terdapat keadilan atau transparansi antara pihak pemerintah dan masyarakat luas.

Didalam sebuah kaidah fikih menyatakan bahwa menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan, yaitu maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah

kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Jadi dengan demikian dari sisi *Maslahah* penyaluran bantuan program PEMP ini lebih baik di tiadakan atau diganti dengan program lain terkecuali dilakukan perbaikan sehingga modharat yang timbul akibat program PEMP menjadi lebih kecil atau hilang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Teluk Bogam melalui program pemberdayaan (PEMP) berdasarkan tujuan dan manfaat yang diperoleh bagi penerima program bantuan PEMP sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, akan tetapi pada proses penyaluran bantuannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena banyak sekali mengandung mudharat di antaranya tidak terdapat keadilan dan transparansi antara pihak pemerintah dan masyarakat luas serta dapat mengurangi atau menghilangkan *Maşlahah* yang ingin dicapai dari program tersebut.
2. Faktor yang Melatari Kesuksesan dan Kegagalan Dalam Pemberdayaan Melalui Program (PEMP) yaitu faktor pendukung adalah kelembagaannya sudah berbentuk kelompok, dana disiapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah juga menyiapkan dana pendamping pada kegiatan tersebut serta pemerintah pusat ikut monitoring evaluasi dengan adanya pendampingan. Sedangkan faktor yang dapat menghambat jalan program PEMP adalah, bantuan tidak merata atau terkesan tebang pilih, kelompok yang lolos verifikasi beranggapan bahwa bantuan yang di berikan adalah hasil usaha mereka sendiri sehingga tidak ada upaya yang luar biasa dari mereka

dalam memanfaatkan bantuan yang telah diterima, pola gaya hidup kelompok masih sangat konsumtif atau terkesan boros yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural, manajemen keuangan yang buruk dan tidak dilakukan pendampingan dari pemerintah yang harusnya rutin dilakukan sehingga terjadi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan manajemen yang dilakukan oleh para KUB menjadi kurang baik atau bisa dikatakan buruk yang menjadi akar terjadinya kemiskinan secara struktural.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Pola Program PEMP lebih baik di hentikan karena banyak sekali mengandung muharat, apa bila pun harus dilanjutkan sudi kiranya system yang ada diperbaiki agar benar-benar tidak ada mudharat dan sesuai prinsip-prinsip ekonomi islam serta dapat membantu para masyarakat desa pesisir.
2. Pola Program PEMP yang ada sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sangat sayang apabila akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan menjadi tidak sesuai dengan apa yang di kehendaki program PEMP. Maka untuk pihak kementerian terkait sudikiranya melakukan perombakan untuk memperbaharui system yang ada agar program PEMP dapat berjalan dengan baik serta tujuan dari program PEMP dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Syaifuddin Asep, *Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: CV. Sinar Karya, 2003
- Kusnadi Edi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Koesnadi, *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Hendra Esmara, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Syamil CiptaMedia, 1987
- Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Gava Media, 2004
- Nanih Machendrawaty, dkk., *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2001
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung : Alfabeta, 2007
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005
- Doli, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ahmad M Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah dan LPPM, 2005

Abu Bakar, Jabir al – Jawazir, *'Aisar al- tafsir, Juz II Madinah al munawarah: al maktabah al- ulum wa al-Hikmah, 1994*

Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2007

B. INTERNET

BPS Desa Teluk Bogam h. 5 lihat di <http://kobarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 11-10-2017.

BPS Kotawaringin Barat lihat di <http://kobarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 2- 6 -2018.

